

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL

**FORMULASI KONSEP ISLAM TENTANG
PEMBANGUNAN EKONOMI PADAT PENDUDUK
(ANALISIS PEMIKIRAN FAHIM KHAN)**



Oleh :

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

**Dibiayai dengan Anggaran DIPA
IAIN Walisongo Tahun 2014**

**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN WALISONGO SEMARANG**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Dr. Ali Murtadho, M.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 30 Agustus 1971
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan penelitian yang berjudul "Formulasi Konsep Islam tentang Pembangunan Ekonomi Padat Penduduk (Analisis Pemikiran Fahim Khan)" adalah asli hasil karya saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Semarang, 14 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag

ABSTRAK

Beberapa teori tentang strategi pembangunan di negara yang mengalami problem kependudukan kebanyakan dirumuskan oleh para ekonom konvensional berfaham neoklasik yang banyak mendapat kritikan. Fahim Khan termasuk pemikir ekonomi Islam kontemporer yang mengkritik strategi pembangunan ekonomi konvensional disertai tawaran alternatif dari perspektif ekonomi Islam.

Permasalahan penelitian ini adalah: Apa substansi pemikiran Fahim Khan tentang strategi Islami bagi pembangunan ekonomi padat penduduk, apa yang melatarbelakanginya, bagaimana pola pendekatan yang dipakai, serta bagaimana korelasinya dengan konsep operasional lembaga keuangan/perbankan syariah.

Penelitian ini termasuk *library research* dengan sumber data primer buku *Essays in Islamic Economics* karya Fahim Khan. Penelitian ini memakai pendekatan ekonomi Islam dengan analisis kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penciptaan peluang kewirausahaan dijadikan Fahim Khan sebagai kata kunci dalam konsepnya yang mengkritisi strategi konvensional dan mendukung strategi pembangunan ekonomi Islam. Strategi membuka dan menyemarakkan usaha mandiri kreatif produktif ini yang dipandang sesuai dan didukung sistem ekonomi Islam berbasis kemitraan berbagi untung dan rugi (*profit-loss sharing*). Strategi ini berbeda dengan strategi ekonomi konvensional berbasis bunga yang menekankan akumulasi modal untuk pengembangan industri guna menyerap lebih banyak tenaga kerja. Gagasan Fahim Khan tidak terlepas dari konteks latar belakang akademik dan kiprahnya memperkenalkan sistem keuangan Islam. Dalam merumuskan gagasannya, Fahim Khan memakai metode pemikiran retrospektif dimana ia merumuskan konsepnya dengan memotret fenomena ekonomi kontemporer aturan normatif ekonomi Islam yang ia interpretasikan dalam model ekonomi makro. Pemikiran Fahim Khan tidak terlepas dari semangat menyemarakkan bank syariah. Gagasannya mempromosikan keunggulan sistem perbankan berbasis bagi hasil

atas sistem perbankan konvensional berbasis bunga dalam memacu pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja dengan menyemarakkan kewirausahaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT mengiringi terselesainya penulisan laporan hasil penelitian ini. Penelitian ini menganalisis pemikiran Fahim Khan tentang strategi pembangunan ekonomi di negara padat penduduk dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang jelas bagi kajian ekonomi Islam dan memperkaya khazanah pemikiran ekonomi pembangunan Islam.

Terselesainya penulisan laporan penelitian ini ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang amat berarti bagi penulis dalam merampungkan penelitian ini. Penulis sangat berterima kasih kepada pimpinan IAIN Walisongo dan segenap jajarannya, kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo dan segenap jajarannya, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo beserta segenap dosen dan karyawan-karyawannya, dan semua pihak yang memungkinkan peneliti mendapat bantuan dana bantuan DIPA-IAIN Walisongo Tahun 2014 bagi penelitian ini.

Banyak pihak yang berjasa dan ikut memberi kontribusi dalam penulisan laporan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberi balasan yang setimpal atas kebaikan mereka, selain doa semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya dengan segala

kekurangan yang ada, penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberi manfaat, amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	14
C. Pembatasan Masalah	15
D. Signifikansi Penelitian	16
E. Kajian Pustaka/Riset Terkait	17
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	21
BAB II : MASALAH KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	23
A. Kependudukan dan Masalah Ekonominya	23
B. Pengangguran: Masalah Utama Kelebihan Jumlah Penduduk	26
C. Teori Pembangunan Ekonomi Mengatasi Masalah Surplus Tenaga Kerja	36
BAB III : KONSEP FAHIM KHAN TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI SURPLUS TENAGA KERJA	58
A. Sekilas tentang Fahim Khan dan Karya- Karyanya	58

B. Kritik Fahim Khan terhadap Strategi Pembangunan Ekonomi Konvensional	62
C. Alokasi Surplus Tenaga Kerja dalam Ekonomi Islam Menurut Fahim Khan	65
D. Strategi Islami Pembangunan Ekonomi dalam Pandangan Fahim Khan	71
E. Model Makro Ekonomi Fahim Khan tentang Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Bebas Bunga	86
BAB IV : KONSEP FAHIM KHAN DALAM DISKURSUS EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER	92
A. Latar Belakang Konsep Fahim Khan dan Pendekatan yang dipakai	92
B. Analisis Implementasi Gagasan Fahim Khan dalam Diskursus Pembangunan Ekonomi Kontemporer	98
C. Konsep Fahim Khan dan Pengembangan Ekonomi Islam di Bidang Perbankan	111
BAB V : KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	124
B. Saran-saran	126
C. Penutup	127
DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan ekonomi belum banyak dikembangkan dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, padahal secara umum negara-negara Islam sangat berkepentingan dengan strategi jitu mengatasi keterpurukan ekonomi. Di antara negara-negara Muslim ada beberapa yang masuk kategori negara sangat miskin. Negara-negara berkembang yang ekonominya masih terbelakang kebanyakan juga negara Muslim misalnya Indonesia. Sedangkan negara-negara Timur Tengah yang dipandang relatif kaya ternyata warisan kekayaan sumber daya alamnya yang berupa minyak belum dapat dikelola secara optimal.¹

Begitu memprihatinkannya kondisi perekonomian negara-negara muslim tersebut bukan karena disebabkan sumber daya alamnya yang miskin, tetapi karena tidak tepatnya strategi pembangunan dalam mengelola sumber daya alam yang ada ditengah padatnya jumlah penduduk. Memang diakui adanya keterbelakangan dunia muslim pasca era penjajahan Barat, yang diikuti oleh ketergantungan terhadap Barat baik dari sisi

¹ Ahmad Djunaidi & Thobieb Al-Azhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006, hlm. 14.

ekonomi maupun keilmuan ekonomi, termasuk banyaknya strategi pembangunan yang diimpor untuk diterapkan dalam pembangunan ekonomi.

Kajian teoritis mengenai strategi pembangunan mulai dirasakan arti pentingnya setelah berakhirnya perang dunia kedua.² Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab klasik (*classical economists*) yaitu ahli ekonomi yang hidup di antara zaman Adam Smith (1776) dan zaman Keynes (1936), tidak banyak membuat analisis perkembangan ekonomi secara makro. Kurang adanya perhatian tersebut disebabkan karena menurut keyakinan mereka sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Penggunaan tenaga kerja penuh (kesempatan kerja penuh / *full employment*) akan selalu tercapai dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan. Meskipun ketidakstabilan dalam perekonomian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kemunduran ekonomi, dapat saja ada dalam setiap perekonomian, namun masalah-masalah tersebut menurut mereka hanya sementara karena sistem pasar bebas akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah tersebut akan lenyap dengan sendirinya dan

² Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE, 1996, hlm. 3

pertumbuhan ekonomi yang menguat akan berlangsung kembali.³

Dalam tahun 1929-1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan *The Great Depression*. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya (ukuran dari tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sesuatu negara) mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran ekonomi yang serius itu meluas ke seluruh dunia. Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dan teori-teori ekonomi sebelumnya juga tidak dapat menerangkan mengapa peristiwa kemunduran ekonomi yang serius tersebut dapat terjadi. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkemuka yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan baru yang berbeda dengan para ahli ekonomi sebelumnya.⁴

³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 6.

⁴ Pandangan tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan diterbitkan pada tahun 1936 yang akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Lihat : Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 7. Lihat pula :

Keynes mengkritik keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat selalu dapat dicapai. Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sesuatu negara. Dengan demikian tingkat penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian tergantung kepada sampai di mana besarnya permintaan efektif yang tercipta dalam perekonomian.⁵ Pandangan Keynes mengenai pengangguran tersebut cukup rasional namun masih menyisakan persoalan yang cukup berat, ialah bagaimana cara meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Persoalan ini terasa lebih berat lagi di negara-negara berkembang yang miskin, bagaimana kesahajaan mereka dengan tingkat pendapatan minim dapat menaikkan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Belum lagi jika memang permintaan barang dan jasa meningkat sementara tingkat keahlian mereka masih minim maka justru kondisi ini tidak meningkatkan aktifitas ekonomi dalam negeri yang banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri, tetapi malah mereka menjadi pasar potensial produksi luar negeri yang memakmurkan negara luar yang sudah maju dan menambah kemiskinan dalam negeri sendiri.

Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, second edition, New York : Routledge, 2001, hlm. 439-440.

⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 7, 85.

Di kebanyakan penduduk negara berkembang sebagian besar penduduk bermukim di pedesaan. Mata pencahariannya tergantung terutama dari produksi primer yaitu sektor pertanian (termasuk perikanan dan peternakan) dan sektor ekstraktif (pertambangan dan kehutanan). Bertambahnya penduduk dan angkatan kerja menimbulkan kesulitan di sektor pertanian dan sektor-sektor yang dekat dengannya. Akibatnya timbul apa dikenal sebagai fenomena pengangguran secara terselubung di daerah pedesaan (*rural disguised unemployment*). Sebagian di antara golongan tenaga kerja mengalir ke kota dan menimbulkan masalah urbanisasi. Salah satu akibat gerak arus tenaga kerja dari daerah pedesaan ke lingkungan kota (*rural-urban migration*) ialah dialaminya *urban underemployment*. Banyak di antara jumlah tenaga kerja di kota-kota dan sekitarnya tidak sepenuhnya produktif sehingga pendapatannya tidak memadai kebutuhan hidupnya secara minimal sekalipun. Muncul juga tambahan masalah kesempatan kerja yaitu yang disebut *low-quality employment* artinya jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukannya mengandung mutu yang rendah dengan penghasilan yang tidak memadai. Tenaga kerja itu telah terpaksa menerima suatu pekerjaan karena tidak atau belum ada peluang dalam bidang-bidang lain. Dalam perimbangan-perimbangan keadaan yang secara umum dibentangkan di atas, maka ada saling keterkaitan antara tingkat pendapatan rendah dan tingkat produktivitas rendah. Kenyataan tersebut tentu tidak

menguntungkan bagi proses pembentukan modal (*capital formation*) dan akumulasi modal (*capital accumulation*).⁶

Menyikapi masalah di atas muncul konsep Arthur Lewis (lahir 1915) tentang dua sektor ekonomi: sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional mencakup kegiatan pertanian rakyat maupun berbagai macam kegiatan informal dalam kawasan kota (bersifat *self-employment*) dan bersifat mempertahankan tingkat konsumsi. Sedangkan sektor modern mencakup tidak saja industri manufaktur melainkan juga pertanian, perdagangan, perkebunan dan pertambangan. Yang membedakan antara keduanya adalah bahwa dalam sektor tradisional kegiatan ekonomi berkisar pada upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan dalam sektor modern terdapat kegiatan produksi bersifat komersil dengan maksud untuk mendapat laba (*profit motive*). Di sektor tradisional, produktivitas tenaga kerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja di sektor modern. Sebagai contoh misalnya keluarga petani dengan anggota keluarga yang cukup banyak namun mengerjakan sawah yang sangat sempit, maka tentu produktivitas tenaga kerjanya sangat rendah. Kondisi demikian memunculkan pengangguran dalam bentuk “pengangguran tersembunyi” ataupun “setengah menganggur”,

⁶ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994, hlm. 63-64.

atau juga “pengangguran bermusim”.⁷ Dengan demikian terjadi kelebihan tenaga kerja yang dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor modern. Dengan demikian konsep Arthur Lewis adalah dengan memperluas sektor modern yang membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat menarik kelebihan tenaga kerja yang ada di sektor tradisional. Tetapi pengalaman empiris di negara-negara berkembang menandakan betapa sulitnya untuk menyerap sejumlah penganggur dari sektor tradisional dan mengalihkannya secara permanen ke sektor modern sebagai angkatan kerja produktif. Proses demikian itu jauh dari lancar dan memerlukan waktu yang relatif lama.⁸ Dengan demikian gagasan Arthur tersebut kurang efektif diterapkan di negara berkembang.

Raul Prebisch (1901-1986) juga memberikan gagasan tentang strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Meskipun bukan termasuk golongan yang beraliran neo-marxis,

⁷ Pengangguran tersembunyi terjadi ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan. Sedangkan setengah menganggur terjadi jika pekerja memiliki jam kerja atau waktu kerja jauh lebih sedikit dari yang normal, misalnya hanya bekerja satu atau dua hari dalam seminggu. Pengangguran. Sementara pengangguran bermusim adalah pengangguran yang terkait dengan musim, misalnya petani atau nelayan pada musim tertentu tidak bekerja. Lihat : Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 330-331.

⁸ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994, hlm. 93-95. Lihat pula : Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development*, Edisi V, New York : Oxford University Press, 1989, hlm. 125-129.

namun pendekatannya terhadap perekonomian negara-negara berkembang sejalan dengan garis pemikiran para penganut teori *dependencia*, yaitu masalah pertentangan kepentingan dalam sistem ekonomi global antara negara-negara induk (negara-negara industri maju) dan negara-negara periferi (negara-negara berkembang yang ketinggalan dalam perkembangan ekonominya), dimana antara kedua kelompok negara ini terdapat kesenjangan yang semakin besar dalam hal tingkat pendapatan dan tingkat pengangguran. Hal ini terkait dengan struktur ekonomi di kedua kelompok negara tersebut. Di negara-negara industri maju struktur ekonominya homogen dengan ditandai diversifikasi. Sedangkan di negara-negara berkembang struktur ekonominya heterogen dalam arti ragam kegiatan ekonomi berlangsung sendiri-sendiri tanpa adanya bejana yang berhubungan, dan bersifat sempit terbatas (berat sebelah di sektor produksi primer). Terbatasnya kegiatan ekonomi pada sektor primer jelas mempengaruhi nilai tukar komoditi primer terhadap barang industri dalam perdagangan internasional. Kesimpulan pokok gagasan Prebisch ialah bahwa industrialisasi menjadi prasyarat untuk keluar dari dilemma tersebut. Yakni dengan memproduksi setempat di dalam negeri barang-barang industri yang selama ini diimpor dari negara-negara induk, disertai diversifikasi ekspor secara horizontal (mencakup lebih banyak berbagai jenis komoditi) maupun vertikal (melakukan industri pengolahan dari komoditi primer, baik hasil buminya

maupun bahan pertambangannya). Pada tahap perkembangan yang lebih lanjut, negara-negara periferi harus mampu menjadi negara eksportir barang industri manufaktur.⁹ Dengan cara ini, di samping pendapatan negara naik, masalah pengangguran yang kronis bisa diatasi dalam kerangka teori Prebisch.

Beberapa teori tentang strategi pembangunan di negara yang mengalami problem kependudukan tersebut kebanyakan dirumuskan oleh para ekonom konvensional yang banyak dibingkai paham kapitalisme. Namun gagasan tersebut tidak terlepas dari berbagai sorotan kritis. Ekonomi neoklasikal yang liberalistik dengan bersendikan fundamentalisme pasar tersebut dinilai hanya berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dengan keyakinan bahwa hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat dapat teratasi.¹⁰ Mahbub ul Haq, menyatakan kritiknya sebagai berikut: "Yes, increased productivity is necessary. But let us ask the question, increased productivity of whom and for whom? Not only should a strategy be designed for the distribution of productive assets and public social services, the productivity of the majority of the poor should be increased."¹¹

⁹ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994, hlm. 116-117.

¹⁰ Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010, hlm. 49.

¹¹ Mahbub ul Haq, *Reflections on Human Development : How The Focus of Development Economics Shifted from National Income*

Dalam jajaran para pemikir ekonomi Islam, kritik terhadap strategi pembangunan barat disertai tawaran alternatif dari perspektif ekonomi Islam dilontarkan oleh Fahim Khan, ketua Pusat Bisnis Islam Universitas Internasional Riphah Pakistan, aktivis dan pernah menjadi direktur Islamic Research and Training Institute (IRTI). Ia memperoleh gelar BA dan MA di bidang Statistik dari Universitas Punjab Pakistan, dan memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi dari Boston University USA. Dalam bukunya *Essays in Islamic Economics*, ia menulis secara khusus topik “Development Strategy in an Islamic Framework With Reference to Labour-Abundant Economies”.

Pemikiran Fahim Khan berangkat dari keprihatinannya terhadap strategi konvensional dalam mengatasi problematika pengangguran terutama di negara-negara yang sedang berkembang yang berupaya memacu pembangunan ekonomi. Fokus perhatian strategi tersebut bertumpu pada masalah banyaknya surplus tenaga kerja serta kondisi upah yang memprihatinkan. Pembangunan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor formal agar dapat menyerap seluruh surplus tenaga kerja, dan membawa negara menuju sebuah kondisi di mana perekonomian tertata sedemikian rupa dan bergerak maju dalam proses pembangunan

berkelanjutan. Penciptaan lapangan kerja ini memerlukan akumulasi modal melalui mobilisasi tabungan atau bahkan dengan pinjaman dari luar negeri. Kalangan pemodal diharapkan dapat berinvestasi sebesar-besarnya. Diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan keuntungan kelompok kapitalis ini dengan berbagai insentif fiskal dan moneter dengan tetap mempertahankan upah dalam tingkat minimal. Investasi berkelanjutan dari surplus kapitalis akan membawa perekonomian ke sebuah fase di mana semua surplus tenaga kerja dapat terserap yang menjadikan kaum kapitalis tidak mungkin lagi untuk tetap mempertahankan upah pada tingkat upah minimal (subsisten). Tekanan-tekanan dari sisi penawaran tenaga kerja akan memaksa upah naik. Ini akan menjadi titik balik bagi perekonomian atau fase tinggal landas. Dengan kondisi perekonomian yang sudah tertata sedemikian rupa, akan terjadi pertumbuhan berkelanjutan yang meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dengan upah yang meningkat. Fokus dari strategi yang demikian adalah memperluas kesempatan kerja pada tingkat yang mempercepat penyerapan suplai tenaga kerja. Fahim Khan menilai strategi semacam itu tidak berhasil memenuhi harapan mencapai tahap tinggal landas. Ia mengambil contoh kegagalan strategi tersebut di beberapa negara seperti Pakistan, Bangladesh dan Indonesia.¹²

¹² Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995, hlm. 97-98.

Strategi pembangunan dalam kerangka ekonomi konvensional lebih terfokus pada penciptakan kesempatan kerja berupah tertentu. Strategi yang mempersyaratkan investasi besar dari kalangan kapitalis untuk menciptakan lapangan kerja ini dinilai kurang mendukung ketersediaan peluang kewirausahaan rakyat yang mandiri. Ketersediaan peluang kewirausahaan bagi sumber daya manusia mempersyaratkan beberapa hal yang tidak dijumpai dalam sistem ekonomi yang berporos pada kapitalisme. Persyaratan yang belum dapat dipenuhi tersebut antara lain: ketersediaan modal bagi rakyat yang akan memulai usaha, adanya sistem yang menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan wirausahawan, adanya sistem jaminan sosial yang dapat menopang kehidupan pelaku usaha sampai mereka berhasil dalam usaha mereka.¹³

Jika dibandingkan dengan institusi berbasis bunga, institusi berbagi hasil lebih memberi motivasi untuk lebih memilih kegiatan kewirausahaan dari pada pekerjaan berupah tetap karena lebih kecilnya kekhawatiran akan resiko. Misalnya ketika terjadi kerugian, wirausahawan yang meminjam modal berbasis bunga, tidak hanya menghadapi beban mengembalikan modal pinjaman dengan bunganya tetapi juga menghadapi resiko kelaparan diri dan keluarganya akibat kerugian usaha yang dideritanya. Dalam menghadapi risiko tersebut, pekerjaan yang berupah tetap yang menjamin paling tidak kebutuhan menutupi

¹³ Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, hlm. 198-199.

kelaparan akan selalu lebih disukai. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, risiko apapun dalam kegiatan wira usaha dibagi di antara pelaku usaha dan pemilik modal finansial. Ketika terjadi kerugian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal; semua yang dipertaruhkan pelaku usaha adalah upaya/kerja mereka. Juga tidak ada ketakutan kelaparan karena ada institusi sosial yang menjaminkannya. Dalam suasana yang demikian, sumber daya manusia akan lebih tertarik terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dari pada pekerjaan dengan upah tetap. Pilihan mereka pada pekerjaan tetap hanya bersifat sementara sampai mereka dapat menemukan modal finansial yang diperlukan untuk memulai kegiatan kewirausahaan.¹⁴

Pandangan Fahim Khan tersebut mewakili pandangan para ahli ekonomi Islam pada umumnya yang mempromosikan keunggulan sistem ekonomi Islam yang tidak berbasis bunga ini sebagai sistem ekonomi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah krusial ekonomi. Namun di sisi lain ada semacam inkonsistensi ketika dalam tulisannya yang lain, Fahim Khan larut dalam arus penyemarak bank/lembaga keuangan syari'ah yang mentolerir teknik pembiayaan perbankan syari'ah yang tidak berbasis bagi hasil, sebagaimana dinyatakannya: "It, however, does not mean that the other financing techniques are less important and need to be discarded. They have their own uses and applications both at micro and macro levels. They not

¹⁴ Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, hlm. 203-205.

only complement the profit-loss sharing methods but also provide flexibility of choice to meet the specific needs of different sectors and different economic agents in the society.”¹⁵

Pandangan Fahim Khan tersebut menyisakan pertanyaan lebih jauh mengenai implementasinya di tengah perkembangan ekonomi Islam kontemporer yang didominasi oleh kesemarakan promosi bank syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya. Sejauh mana rumusan-rumusan konsep tersebut kompatibel dengan berbagai konsepsi perbankan syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya dalam bersinergi mewujudkan misi substantif ekonomi Islam mensejahterakan kehidupan umat secara komprehensif.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apa substansi pemikiran Fahim Khan tentang strategi Islami bagi pembangunan ekonomi padat penduduk dan bagaimana kejelasan implementasinya ?
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya konsep tersebut dan bagaimana pola pendekatan kajian ekonomi Islam yang dipakai Fahim Khan dalam menformulasikan konsep tersebut?
3. Bagaimana korelasi substansial antara konsep strategi pembangunan ekonomi Islam tersebut dengan konsep operasional lembaga keuangan/perbankan syariah?

¹⁵ Fahim Khan, Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques, <http://www.irti.org/>, diakses 14 Februari 2014.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan penelitian ini dibatasi pada penelaahan mendalam tentang strategi pembangunan ekonomi Islam pada negara dengan penduduk/sumber daya manusia melimpah yang diformulasikan oleh Fahim Khan dalam tulisannya yang berjudul “Development Strategy in an Islamic Framework With Reference to Labour-Abundant Economies”. Sesuai rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah berikut:

1. Substansi pemikiran Fahim Khan tentang strategi pembangunan ekonomi Islam dan kejelasan implementasinya.
2. Latar belakang munculnya pemikiran Fahim Khan tersebut dan pola pendekatan kajian ekonomi Islam yang dipakainya dalam merumuskan konsep strategi tersebut.
3. Hubungan antara konsep Fahim Khan tersebut dengan konsep operasional lembaga keuangan syari'ah/perbankan syari'ah dari sisi substansinya.

D. Signifikansi Penelitian

Di tengah mendominasinya teori ekonomi makro konvensional tentang strategi pertumbuhan/pembangunan ekonomi dengan berbagai kritikan yang menyertainya, diperlukan teori alternatif dari khazanah pemikiran Ekonomi

Islam. Di sisi lain khazanah pustaka ekonomi Islam lebih didominasi oleh konsep-konsep ekonomi bebas bunga, prinsip bagihasil, teori konsumsi, produksi dan distribusi dalam ekonomi Islam, perbankan Syari'ah dan semacamnya, sementara pembahasan masalah strategi pembangunan ekonomi masih sangat minim. Penelitian ini memiliki signifikansi untuk meramaikan khazanah ekonomi Islam dengan menyajikan kejelasan konsep alternatif tentang strategi pembangunan Islami yang dapat diterapkan di negara dengan jumlah penduduk/sumber daya manusia melimpah. Di samping itu secara khusus penelitian ini disusun guna ikut berkontribusi secara akademis bagi pengembangan konsentrasi studi pembangunan Islam pada Proram Studi Ekonomi Islam IAIN Walisongo. Secara lebih luas penelitian ini disamping memiliki manfaat akademis juga memiliki manfaat praktis bagi pemegang kebijakan perencanaan pembangunan.

E. Kajian Pustaka/Riset Terkait

Riset tentang strategi pembangunan ekonomi Islam masih tergolong langka. Sejauh penelusuran peneliti tulisan Fahim Khan yang berjudul "Development Strategy in an Islamic Framework With Reference to Labour-Abundant Economies" belum banyak mendapat dukungan ataupun kritik melalui tulisan atau penelitian yang mengkajinya.

Salah satu tulisan yang peneliti temukan tentang topik terkait adalah tulisan Abdel Hamid El-Ghazali yang berjudul “Man is The Basis of The Islamic Strategy For Economic Development” yang diterbitkan oleh Islamic Research and Training Institute (IRTI) Jeddah. Buku ini memuat catatan-catatan umum dan fundamental terkait strategi pembangunan ekonomi yang dimaksudkan hanya sebagai kompendium bukan analisis. Penulisnya hanya menggarisbawahi elemen-elemen esensial tanpa menyertakan paparan detailnya. Ia menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dan strategi pembangunan sangat krusial bagi kehidupan kontemporer baik pada level teoritis maupun praktis. Dalam pandangannya, ekonomi Islam adalah sistem etika dan moral secara intrinsik dalam mana manusia menempati posisi sentral baik sebagai sarana maupun tujuan. Fondasi intelektualnya komprehensif dan jelas, realistis, progresif, beradab dan bermoral. Ia juga menegaskan bahwa metodologi sistem ekonomi Islam adalah bijaksana, realistis dan efektif. Ketika diterapkan secara tepat selama periode awal Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW para khulafa al-rasyidin dan berikutnya di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sistem ekonomi Islam telah menunjukkan kesuksesannya.¹⁶

¹⁶ Abdel Hamid El-Ghazali, *Man is The Basis of The Islamic Strategy For Economic Development*, Jeddah: IRTI-IDB, 1994, hlm. 57.

Dibanding dengan tulisan Fahim Khan, tulisan Abdel Hamid El-Ghazali tersebut kurang spesifik dan lebih umum mengungkap keunggulan ekonomi Islam. Karya Fahim Khan lebih spesifik dan praktis. Namun sejauh yang penulis telusuri, belum ada riset yang mengkaji atau mengelaborasi pandangan Fahin Khan mengenai strategi pembangunan ekonomi padat penduduk dalam perspektif Islam. Yang pernah dikaji adalah pemikiran Umer Chapar dalam bukunya *Islam and Economic Development* yang diteliti oleh Oji Armuji dari UIN Yogyakarta.¹⁷ Menurutnya, dalam mengkonstruksi paradigma pembangunan ekonomi Islam, M. Umer Chapra mendasarkan pada konsep fundamental pandangan hidup (cetak biru) Islam yang tertuang dalam sumber pokok ajaran Islam al-Qur'an dan as-Sunnah, juga merujuk pada maqashid asy-syari'ah untuk mendukung implementasi pembangunan ekonomi dalam masyarakat islam. Lebih jauh Chapra menerjemahkan pandangan dunia Islam mengenai pembangunan ekonomi ke dalam paket lima tindakan kebijakan (pembangunan sumber daya manusia, pemerataan kekayaan, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, perencanaan kebijakan strategis) dan empat elemen perencanaan kebijakan strategis (mekanisme filter moral, motivasi yang benar, restrukturisasi sosio-ekonomi dan keuangan, peranan negara) secara integratif.

¹⁷ Oji Armuji, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Islam (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)*, UIN Yogyakarta, 2010.

Berpijak pada penelusuran riset sebelumnya, peneliti ingin memfokuskan penelitian pada pemikiran Fahim Khan tentang strategi pembangunan ekonomi Islam pada negara dengan kelimpahan jumlah penduduk, yang belum ada yang menelitinya, namun peneliti memandang cukup signifikan untuk menambah khazanah kajian ekonomi Islam yang bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis.

F. Kerangka Teori

Dalam kajian ekonomika pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh Sumitro Djojohadikusumo, ada perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpijak pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sebagaimana digunakan dalam teori dinamika yang dikembangkan oleh para pemikir Neo-Keynes dan Neo-Klasik. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi dalam perjalanan waktu yang ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Penelitian ini diletakkan dalam kerangka teori pembangunan ekonomi tersebut.

Sedangkan analisis ekonomi Islam dalam penelitian ini berpijak pada kerangka metodologi kajian ekonomi Islam yang diformulasikan oleh Monzer Kahf yang menyebutkan ada dua metode. Pertama, metode deduksi sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum Islam/fuqaha. Pengaplikasiannya pada ekonomi Islam modern dengan menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dikonsultasikan dengan sumber-sumber Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua,

¹⁸ Soemitro Djojohadikusumo, Op.Cit., hlm. xi.

metode pemikiran retrospektif, dipergunakan oleh banyak penulis Muslim kontemporer, berangkat dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan.¹⁹ Dua metode ini yang akan menjadi pijakan analisis dalam menelaah substansi gagasan dan pendekatan yang dipakai oleh Fahim Khan dalam menformulasikan strategi pembangunan ekonomi untuk diterapkan pada negara padat penduduk dalam bingkai Islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang ingin mengungkap kejelasan konsep Fahim Khan mengenai strategi pembangunan ekonomi Islam pada negara yang berkelimpahan penduduk (sumber daya manusia) ini termasuk kategori *library research*. Sumber datanya berupa data kepustakaan yakni berbagai referensi terkait karya-karya Fahim Khan, utamanya yang terangkum dalam bukunya *Essays in Islamic Economics*. Juga literatur-literatur ekonomi

¹⁹ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam (Telaa Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 12.

Islam dan ekonomika pembangunan, serta literatur-literatur lain yang terkait.

Penelitian ini pada dasarnya memakai pendekatan ekonomi Islam yang mendeduksi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka hukumnya yang diaplikasikan pada praktik ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Mundhir Kahf.²⁰

Jenis analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif.²¹ Artinya penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diteliti dengan menggunakan logika ilmiah, di mana permasalahan penelitian dijawab melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²² Secara lebih spesifik metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yakni pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat,²³ metode deduktif dan juga metode komparatif.

Ringkasnya, penelitian yang tergolong library research dengan pendekatan ekonomi Islam ini dilakukan dengan mengidentifikasi gagasan/pemikiran Fahim Khan dengan

²⁰ Lihat: Muhammad Mundhir Qahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Plainfield, Ind.: Muslim Students Association of U.S. and Canada, 1978, hlm. 10.

²¹ Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat: Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm.. 95.

²² Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 5.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 63.

dikomunikasikan dengan teori-teori ekonomi Islam serta teori-teori ekonomi pembangunan untuk diketahui latar belakang formulasinya, pendekatan yang dipakai, implementasinya serta korelasinya secara substansial dengan konsep operasional lembaga keuangan/perbankan syari'ah.

BAB II

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Kependudukan dan Problematika Ekonominya

Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup yang akan berjalan secara alami, namun sejarah jumlah populasi manusia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan di bidang ekonomi. Alan B Moutjoy dalam bukunya *Industrialization and Developing Countries* mencatat bahwa sekitar tujuh ribu tahun yang lalu ketika mulai ada peradaban, jumlah populasi manusia di dunia diperkirakan 20 juta. Seiring dengan terjadinya kemajuan di bidang 31 pertanian, perdagangan dan kerajinan rumah tangga, jumlah populasi manusia semakin cepat bertambah. Di abad pertama masehi populasi manusia diperkirakan 150 juta jiwa. Pada pertengahan abad ke 17, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 550 juta jiwa. Populasi manusia terus berakselerasi secara cepat di era modern sejak abad ke 17.¹ Pada tahun 1976 populasi manusia di dunia telah melebihi 4 milyar dan hampir dua pertiganya berada di negara-negara berkembang. Di awal abad 21 ini jumlah penduduk dunia lebih dari enam milyar, dan diproyeksikan pada akhir abad 21 jumlah penduduk dunia melebihi 15 milyar.²

¹ Lihat: Alan B. Mountjoy, *Industrialization and Developing Countries*, London: Hutchinson, 1975, hlm. 31-34.

² Irawan & M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE, 1996, hlm. 49.

Dalam teori ekonomi kependudukan, cepatnya pertambahan jumlah penduduk akan menghambat perkembangan ekonomi. Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, akan selalu ada persaingan atau perlombaan antara tingkat output ekonomi yang dihasilkan dengan tingkat kenaikan jumlah penduduk, yang dimenangkan oleh tingkat kenaikan jumlah penduduk. Penduduk di samping sebagai konsumen juga berfungsi sebagai tenaga kerja. Sebagai konsumen penduduk membutuhkan ketersediaan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai tenaga kerja, penduduk memerlukan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Kenaikan penduduk yang lebih cepat dari tingkat kenaikan ketersediaan output serta tingkat perluasan lapangan pekerjaan akan menimbulkan problematika pembangunan ekonomi.³

Cepatnya pertambahan jumlah penduduk atau disebut dengan ledakan penduduk dapat menjadi salah satu perintang pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang memang pada umumnya mengalami ledakan penduduk. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang biasa diukur dengan kenaikan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita dihitung dari seluruh pendapatan nasional riil atau output yang dihasilkan secara keseluruhan selama satu tahun dibagi seluruh jumlah penduduk. Dengan

³ Ibid., hlm. 47.

bertambahnya jumlah penduduk harus lebih bertambah pula output total yang dihasilkan agar penghasilan riil perkapita naik.⁴

Pada dasarnya penduduk memiliki dua fungsi bagi pembangunan ekonomi, satu fungsi dari sisi permintaan dan fungsi lainnya dari sisi penawaran. Dilihat dari sisi permintaan, penduduk berfungsi sebagai konsumen sedangkan dari segi penawaran, penduduk berfungsi sebagai produsen. Di negara-negara maju pertumbuhan penduduk yang pesat justru berkontribusi bagi kenaikan penghasilan riil perkapita. Tambah penduduk akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga menjadi sumber permintaan yang meningkat. Sebagaimana teori A. Hansen mengenai stagnasi sekuar (*secular stagnation*), bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan agregatif. Demikian juga para penganut Keynes memandang tambahan penduduk sebagai suatu kenaikan daya beli. Mereka memandang bahwa kemajuan, meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja akan selalu mengiringi pertumbuhan jumlah penduduk.⁵

Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan penghambat bagi proses pembangunan ekonomi ketika jumlah penduduk itu memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan (sebagai produsen) dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan (sebagai konsumen). Tingkat

⁴ Ibid., hlm. 43.

⁵ Ibid., hlm. 45-46.

pertambahan penduduk yang tinggi harus disertai tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan jumlah penduduk tetapi tingkat penghasilan rendah tidak akan ada manfaat positif bagi pembangunan ekonomi,⁶ dan justru menjadi satu masalah utama dalam pembangunan.

B. Pengangguran: Masalah Utama Kelebihan Jumlah Penduduk

Ketika terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cepat yang berarti jumlah pencari kerja bertambah banyak, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia masih tetap tidak mengalami perluasan, maka terjadi pengangguran tenaga kerja. Persoalan paling krusial akibat berlimpahnya jumlah penduduk adalah pengangguran. Dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan dinyatakan bahwa terjadinya pengangguran akibat adanya ketidakseimbangan angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang menginginkan pekerjaan (penawaran tenaga kerja) lebih besar dari pada lowongan tenaga kerja yang tersedia (permintaan tenaga kerja). Orang-orang yang menawarkan tenaganya untuk mencari pekerjaan dan berhasil masuk dalam golongan bekerja sedangkan sisanya yang tidak memperoleh pekerjaan masuk dalam golongan penganggur.⁷

⁶ Ibid., hlm. 45.

⁷ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 134.

Di samping tingkat pendapatan riil perkapita, tingkat pengangguran juga menjadi salah satu tolok ukur baik buruknya perekonomian suatu negara. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur (yang tidak memperoleh pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (jumlah tenaga kerja yang tersedia) di suatu negara.⁸ Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (16-64 tahun) yang dinyatakan dalam persen disebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan persentase jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan dari keseluruhan jumlah orang yang menawarkan tenaga kerjanya disebut tingkat pengangguran.⁹ Tingkat pengangguran dapat menjadi indikator kondisi perekonomian di suatu negara.

Terjadinya pengangguran dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi yang berbeda-beda. Meskipun ada generalisasi tentang siapa yang disebut penganggur yakni orang-orang yang berada dalam usia kerja yang sedang mencari kerja tetapi tidak mendapatkan kerja, namun ada pengelompokan jenis-jenis pengangguran (klasifikasi pengangguran) berdasarkan penyebab dan penanganannya. Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan dan

⁸ Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Edisi ke-18. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005, hlm. 287. Lihat juga : Bradley R. Schiller, *The Economy Today*, ninth edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2003, hlm. 116.

⁹ Tentang cara menghitung tingkat pengangguran ini lihat : Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 18. Juga Arfida BR, *Op.Cit.*, hlm. 134. Lihat pula : Bradley R. Schiller, *Op.Cit.*, hlm. 116.

struktur pasar tenaga kerja ada tiga kelompok besar pengangguran yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural dan pengangguran siklikal.¹⁰

Pengangguran Friksional merupakan jenis pengangguran yang terjadi di negara manapun termasuk negara-negara maju. Pengangguran friksional ini adalah kondisi pengangguran ketika sedang dalam proses memperoleh pekerjaan atau berpindah ke pekerjaan baru karena sesuatu alasan.¹¹ Ketika ada cukup banyak permintaan tenaga kerja, kadangkala ada lowongan yang tidak terisi. Penyebabnya mungkin saja karena pencari kerja tidak mengetahui adanya lowongan kerja atau pihak pengusaha tidak mengetahui adanya pencari kerja yang dibutuhkan bisa saja karena ada jarak antara keduanya. Upaya mengatasi pengangguran peralihan seperti ini misalnya dengan memperlancar dan memperluas informasi lowongan kerja.¹² Beberapa penyebab pengangguran friksional lainnya adalah pemberhentian sementara di mana para pekerja menunggu dipanggil kembali.¹³ Pengangguran friksional tidak disebabkan kekurangan atau kelebihan persediaan tenaga kerja, tetapi merupakan kondisi

¹⁰ Lihat misalnya: Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Op.Cit.*, hlm. 288.

¹¹ Akhmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 231-232.

¹² Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986, hlm. 173.

¹³ Campbell R. McConnell, et.al., *Contemporary Labor Economics*, Edisi VII. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006, hlm. 545.

menganggur sementara, sehingga disebut pengangguran peralihan (*frictional unemployment*).¹⁴

Pengangguran struktural adalah pengangguran terjadi karena tidak sinkronya struktur angkatan kerja berdasarkan keterampilan, jenis pekerjaan, industri, dan lokasi geografis dengan struktur permintaan tenaga kerja.¹⁵ Ada ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang dapat terjadi ketika permintaan terhadap satu jenis pekerjaan meningkat sementara permintaan terhadap jenis pekerjaan yang lain turun, sedangkan sisi penawaran tenaga kerja tidak dapat menyesuaikan secara cepat.¹⁶ Dari sisi penyebabnya ada dua macam pengangguran struktural. Pertama, pengangguran struktural yang terjadi karena perubahan struktur pasar barang, di mana suatu barang/jasa yang semula laku keras tiba-tiba tidak laku dijual yang berimbas pada permintaan tenaga kerja produsen barang/jasa tersebut. Kedua, pengangguran struktural di negara berkembang karena struktur perekonomian yang belum maju yang kurang mampu menciptakan lapangan kerja produktif untuk seluruh angkatan kerjanya.¹⁷

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang memang terjadi permintaan tenaga kerja secara keseluruhan rendah,¹⁸ di

¹⁴ Soeroto, Op.cit., hlm. 172-173.

¹⁵ Akhmad Mahyudi, Op.Cit., hlm. 232.

¹⁶ Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Op.Cit., hlm. 288.

¹⁷ Soeroto, Op.Cit., hlm. 179-182.

¹⁸ Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Op.Cit., hlm. 288-289.

mana jumlah pekerja yang diminta lebih kecil dari angkatan kerja yang tersedia. Tidak memadainya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa berimbas pada menurunnya permintaan tenaga kerja.¹⁹ Pengangguran semacam ini disamping disebut pengangguran siklikal juga disebut pengangguran makroekonomi. Disebut siklikal karena terkait dengan siklus kegiatan ekonomi yang mengalami pasang surut. Disebut pengangguran makroekonomi karena efek pengangguran ini menimpa keseluruhan ekonomi secara makro dan tidak hanya menimpa beberapa industri tertentu.²⁰ Angkatan kerja akan selalu tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terjadinya imigrasi, pengangguran siklikal akan terjadi ketika ekonomi tidak tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang lamban akan menyebabkan angka pengangguran naik.²¹

Di negara-negara berkembang yang mengalami kepadatan penduduk ada bentuk-bentuk pengangguran di samping pengangguran friksional, structural dan siklikan. Pengangguran di Negara surplus tenaga kerja ada yang berbentuk setengah pengangguran yang kelihatan (*visible underemployment*) dan ada

¹⁹ Bradley R. Schiller, *Op.Cit.*, hlm. 122-123.

²⁰ Martin Bronfenbrenner, et.al., *Economics*, Edisi II. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989, hlm. 100.

²¹ Bradley R. Schiller, *Op.Cit.*, hlm. 123.

yang berbentuk pengangguran tidak kelihatan (disguised unemployment / invisible underemployment).²²

Angkatan kerja di negara-negara berkembang padat penduduk mengalami kondisi bekerja yang lebih varetif. Di samping ada angkatan kerja yang betul-betul tidak bekerja (disebut penganggur penuh/unemployment) ada juga yang setengah menganggur (underemployment). Penduduk tergolong setengah menganggur/ underemployment manakala mereka bekerja lebih sedikit (harian, mingguan atau musiman) dari pada yang mereka inginkan.²³ Setengah pengangguran ini menjadi ciri utama negara berkembang berpenduduk padat di mana jumlah angkatan kerja terus menerus bertambah.²⁴

Dinamakan setengah pengangguran yang kelihatan (visible underemployment) ketika jumlah waktu kerja yang digunakan lebih sedikit daripada waktu kesanggupan bekerja. Setengah pengangguran ini nampak pada sektor kerajinan dan industri, lebih khusus lagi pada sektor pertanian di negara-negara sedang berkembang.²⁵

Sedangkan bentuk pengangguran tidak kelihatan (invisible underemployment/ disguised unemployment) terjadi ketika para

²² Irawan & M. Suparmoko, Op.Cit., hlm. 68.

²³ Michael P. Todaro, *Economic Development in The Third World*, Edisi IV, New York : Longman, hlm. 243. Lihat juga Irawan & M. Suparmoko, Op.Cit., hlm. 68.

²⁴ Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development*, edisi V, New York : Oxford University Press, 1989, hlm. 111.

²⁵ Irawan & M. Suparmoko, Op.Cit., hlm. 69.

pekerja yang bekerja secara penuh pada satu pekerjaan dapat ditarik ke sektor pekerjaan yang lain tanpa mengurangi output yang dihasilkan.²⁶ Bentuk pengangguran seperti ini terjadi di negara-negara berkembang khususnya Asia yang kelebihan tenaga kerja di bidang pertanian. Produktivitas marginal para pekerja di bidang pertanian ini nol artinya ketika pekerja tersebut berhenti dari komunitas pekerjaannya, hasil pertanian tetap sama tidak berkurang. Fenomena ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah sedangkan tanah garapan tidak bertambah bahkan menyempit, sedangkan modal dan tehnik penggarapannya masih tetap.²⁷

Kajian intensif terhadap masalah pengangguran menghasilkan berbagai teori²⁸ yang menjelaskan berbagai gejala atau variabel yang berhubungan dengan pengangguran. Misalnya teori yang menjelaskan keterkaitan hubungan antara laju

²⁶ Ibid., hlm. 69-70.

²⁷ Gerald M. Meier, Op.Cit., hlm. 115.

²⁸ Teori dapat diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis di antara berbagai gejala atau di antara perubahan (“variable”) dalam bidang tertentu, sehingga dapat dipergunakan sebagai rangka berpikir (“frame of thinking”) dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut. Apabila teori merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal di antara berbagai variable sehingga dapat dipergunakan sebagai rangka berpikir untuk memahami dan memecahkan permasalahan tertentu, sedangkan strategi merupakan rangkaian kebijaksanaan dan pelaksanaan (policy decision and execution) di dalam rangka pencapaian tujuan atau dalam memecahkan persoalan tertentu, maka sudah tentu suatu strategi juga akan beranjak dari kerangka teoritis tertentu. Lihat : Bintoro Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Haji Massagung, 1988, hlm. 12, 15.

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi.

Ketika laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang maupun jasa meningkat dan bersama dengan itu tingkat pengangguran menurun. Ada hubungan negatif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Okun (Okun's law),²⁹ sesuai nama penemunya Arthur Okun, yang banyak mengkaji pengaruh-pengaruh kebijakan makro ekonomi ketika ia menjadi staf Dewan Penasehat Ekonomi pada awal pemerintahan Kennedy di tahun 1960 an. Mengacu pada Hukum Okun, waktu normal ekonomi adalah waktu ketika realitas jumlah pendapatan nasional bruto (PNB) yang dihasilkan suatu negara benar-benar sama dengan PNB potensial yang semestinya mampu dihasilkan. Dalam waktu normal ini ketika PNB riil sama dengan PNB potensial, angka pengangguran tidak sampai nol. Bahkan dalam waktu-waktu booming pun masih saja ada pengangguran friksional. Istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk angka pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu normal adalah angka pengangguran alamiah.³⁰ Menurut hukum Okun ketika angka pengangguran naik satu persen di atas angka alamiah maka Produk Nasional Bruto

²⁹ M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE, 1998, hlm. 10.

³⁰ Angka alamiah pengangguran adalah angka pengangguran yang ada ketika keseluruhan ekonomi dalam keseimbangan. Robert E. Hall dan John B. Taylor, *Macroeconomics Theory, Performance, and Policy*, hlm. 368.

(PNB) riil turun 3 persen di bawah PNB potensialnya.³¹ Rasio 1 ke 3 ini adalah formulasi awal hukum awal di mana 1 % kenaikan angka pengangguran berarti kehilangan 3 % output riil. Formulasi hukum Okun yang belakangan menetapkan rasio 1 ke 2 yang berarti setiap 2 % output turun dari potensinya akan membawa 1 % naiknya angka pengangguran secara keseluruhan.³² Perubahan formulasi ini terkait dengan perubahan komposisi tenaga kerja (wanita dan pemuda semakin banyak) dan juga komposisi output (semakin banyak jasa).³³

Di sisi lain, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin tinggi.³⁴ Namun hal ini tidak berlaku sepenuhnya karena ada hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, sehingga setelah suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, jumlah produk total yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan berkurang. Dengan kata lain setelah tenaga kerja mencapai jumlah tertentu, produk marginal tenaga kerja tambahan menjadi negatif. Pada saat itulah terdapat apa yang disebut dengan pengangguran tenaga kerja.

³¹ Robert E. Hall dan John B. Taylor, *Macroeconomics: Theory, Performance and Policy*, Edisi II. New York: W. W. Norton & Company, 1988, hlm. 58.

³² Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Op.Cit., hlm. 284.

³³ Bradley R. Schiller, Op.Cit., hlm. 115.

³⁴ Pada dasarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu dipengaruhi oleh dua factor : ketersediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Lihat : Ibid., hlm. 114.

Faktor tenaga kerja tidak cukup dilihat dari segi jumlahnya saja melainkan juga harus melihat segi kualitas tenaga kerja tersebut.³⁵

Sedangkan hubungan antara pengangguran dan inflasi ditunjukkan oleh kurva Philips yang berasal dari publikasi sebuah studi komprehensif tentang perilaku upah di Inggris selama tahun 1861-1957 yang dilakukan oleh W. Philips, seorang professor pada Sekolah Ekonomi London, di tahun 1957. Kurva Phillips adalah sebuah hubungan terbalik antara angka pengangguran dan angka kenaikan upah uang. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin rendah angka inflasi upah.³⁶ Berarti ada hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat inflasi menjadi lebih tinggi maka tingkat pengangguran menurun dan sebaliknya bila tingkat inflasi turun maka tingkat pengangguran naik.³⁷

Teori tentang pengangguran memang tidak terlepas dari teori-teori terkait karena pengangguran bukanlah persoalan mandiri yang muncul begitu saja. Penjelasan tentang problem pengangguran tidak dapat terlepas dari penjelasan tentang teori pembangunan ekonomi misalnya, karena perluasan kesempatan kerja terkait dengan masalah pembangunan ekonomi dan pengalokasian sumber daya manusia dari penduduk yang banyak. Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan pengangguran.

³⁵ M. Suparmoko, Op.Cit., hlm. 239-240.

³⁶ Rudiger Dornbusch, et.al., *Macroeconomics*, Edisi VIII. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001, hlm. 103.

³⁷ M. Suparmoko, Op.Cit., hlm. 10.

Ketika ekonomi tumbuh dan berada dalam perluasan, pengangguran selalu turun, ketika ekonomi berada dalam resesi, pengangguran selalu naik, meskipun sering dengan kelambatan.³⁸

C. Teori Pembangunan Ekonomi Mengatasi Masalah Surplus Tenaga Kerja

Persoalan surplus tenaga kerja sangat terkait dengan perluasan kesempatan kerja yang berhubungan dengan peningkatan produksi yang tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Seiring dengan era industrialisasi yang diikuti kemajuan dan keterbelakangan negara-negara di dunia dalam bidang ekonomi, banyak ekonom berupaya memperjelas berbagai fenomena pembangunan ekonomi yang berimbas pada penggunaan ketenagakerjaan. Berikut ini dikemukakan beberapa teori pembangunan ekonomi yang terkait dengan masalah pengangguran :

1. Teori Klasik

Tokoh sentral aliran klasik adalah Adam Smith yang terkenal dengan karyanya berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Dasar ajaran Adam Smith adalah individualism dan laissez faire (tanpa campur tangan) adalah semboyan yang lahir dari semangat

³⁸ David C. Colander, *Economics*, Edisi V, New York: McGraw-Hill/Irwin. 2004, hlm. 497-498.

individualisme itu.³⁹ Adam Smith dalam teori pembangunan ekonomi membagi masa atau tahapan dalam lima tahap, yaitu : tahap berburu, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap berdagang, tahap industrialisasi. Dalam tahap industrialisasi, pandangan Adam Smith tentang pengangguran lebih berpijak pada peranan modal. Perluasan kesempatan kerja tergantung pada maraknya proses produksi yang didukung modal besar. Dalam hal ini pemilik modal memegang peranan penting.⁴⁰

Sistem individualisme ekonomi menjadi karakter dasar pandangan Smith. Sistem ini menyerahkan aturan dan penguasaan ekonomi kepada masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pembentukan harga didasarkan kepada hukum permintaan dan penawaran di pasar. Harga yang terbentuk atas dasar mekanisme pasar dengan sendirinya akan mempengaruhi produksi, alokasi, pendapatan dan konsumsi. Dan semuanya akan berjalan lancar apabila setiap orang merdeka bertindak dan berbuat. Mekanisme pembentukan harga yang demikian akan secara otomatis akan selalu menuju keseimbangan.⁴¹

Jika dikaitkan dengan masalah ketenaga kerjaan, persoalan upah yang identik dengan harga dalam pasar

³⁹ Bintoro Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Massagung, 1988, hlm. 30.

⁴⁰ Akhmad Mahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 165.

⁴¹ Bintoro Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

barang tidak bias dipengaruhi oleh siapapun. Tingkat tenaga kerja dan tingkat upah ditentukan secara simultan dengan seluruh harga-harga lain dan penggunaan semua faktor dalam ekonomi oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Upah keseimbangan akan fleksibel menyesuaikan samanya penawaran dan permintaan tenaga kerja.⁴²

Menurut pandangan kaum klasik perekonomian tidak mungkin akan mengalami pengangguran dan akan selalu dalam kesempatan kerja penuh. Pengangguran hanya bersifat sementara. Jika terjadi pengangguran para pekerja yang tidak mendapat pekerjaan akan bersaing satu sama lain termasuk dengan yang sudah mendapatkan pekerjaan dan akan berakibat pada turunnya tingkat upah. Ketika tingkat upah menurun, perusahaan yang meminta tenaga kerja dan buruh yang menawarkan tenaga kerja akan mengadakan penyesuaian, dan akhirnya akan kembali tercapai kesempatan kerja penuh di mana jumlah tenaga yang diminta sama dengan jumlah tenaga yang ditawarkan. Proses tercapainya kesempatan kerja penuh ini dengan adanya penurunan tingkat upah, dan turunnya tingkat upah akan mendorong banyak orang (pemilik tenaga kerja) untuk keluar dari pasar tenaga kerja karena tidak bersedia bekerja lagi atau tidak menginginkan pekerjaan lagi pada tingkat upah yang

⁴² Michael P. Todaro, *Economic Development in the Third World*, New York : Longman, hlm. 247-249.

lebih rendah. Dan mereka yang dengan sengaja tidak mau bekerja atau tidak mencari pekerjaan ini tidak dapat digolongkan sebagai penganggur.⁴³

Teori tersebut mungkin akan tidak bermasalah apabila dunia kenyataan memenuhi persyaratan-persyaratan yang memungkinkan setiap individu memiliki kemampuan yang sama untuk berperan dalam iklim “laissez faire”. Tetapi yang demikian itu yang tidak dijumpai dalam kenyataan. Kaum kapitalis yang dari awal sudah kuat karena memiliki alat-alat produksi mempunyai kebebasan menyusun kekuatan sedangkan kaum buruh berada dalam kedudukan yang lemah.⁴⁴ Kekuatan-kekuatan lain juga banyak dimungkinkan mempengaruhi pasar tenaga kerja, sehingga idealitas pasar kompetitif sempurna yang akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) banyak mengalami kendala dalam realitasnya.

2. Teori Karl Marx

Sejarah kapitalisme di Eropa dengan system laissez fairenya banyak mengakibatkan berbagai bentuk kepincangan sosial di mana “yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah melarat. Kenyataan yang mengecewakan akibat “liberalisme ekonomi” itu, pada pertengahan abad ke-19 telah melahirkan Karl Marx, seorang yang sebenarnya juga

⁴³ M. Suparmoko, Op.Cit., hlm. 167-169.

⁴⁴ Bintoro Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, Op.Cit., hlm. 31.

tergolong dalam aliran klasik yang mengatakan bahwa “nilai ekonomi dari pada barang-barang ditentukan oleh tenaga kerja untuk membuat barang-barang itu”.⁴⁵

Karl Max dalam bukunya *Das Kapital* membagi evolusi (perubahan secara perlahan-lahan) masyarakat menjadi tiga macam yaitu masa feodalis, masa kapitalisme, dan masa sosialisme. Teori pembangunan ekonomi Karl Max didasarkan pada adanya pertentangan kelas antara kapitalis (pemilik modal) dengan proletar (para pekerja). Dalam masa kapitalisme, menurut Karl Max, terjadi eksploitasi (penghisapan) oleh para kapitalis terhadap proletar yang berupa selisih antara tingkat produktivitas para pekerja (marginal physical product of labor) terhadap upah yang diperoleh secara subsistem. Eksploitasi ini menurut Karl Marx pada puncaknya akan menyebabkan terjadinya pemberontakan para pekerja (revolusi) untuk mengubah masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis.⁴⁶

Menurut Karl Marx, bapak intelektual komunisme, siklus bisnis (naik turunnya aktivitas ekonomi) adalah tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi kapitalis. Teorinya menyatakan bahwa kecenderungan menurunnya aktivitas ekonomi secara berkala (resesi) akan terus memburuk dan terus memburuk dan jumlah orang-orang yang menganggur

⁴⁵ Ibid., hlm. 31-32.

⁴⁶ Akhmad Mahyudi, Op.Cit., hlm. 165-166.

akan terus menerus naik hingga para pekerja bangkit dan merobohkan sistem kapitalis.⁴⁷

Dapat ditegaskan bahwa upaya mengatasi pengangguran menurut kerangka berfikir Karl Marx hanya dapat dilakukan dengan cara revolusi mengubah sistem kapitalisme menjadi sistem sosialisme.

3. Teori Keynes (Aliran Keynesian)

Sebelum tahun 1930-an, para ekonom klasik percaya bahwa perubahan-perubahan dalam permintaan dan atau penawaran pasar kerja akan moderat dan bahwa penyesuaian pada kondisi-kondisi keseimbangan baru akan mengambil tempat dengan lembut dan tanpa penundaan yang tak semestinya. Mereka percaya bahwa kondisi ketidakseimbangan hanya terjadi dalam waktu yang pendek.⁴⁸

Ketika terjadi *great depression* yang menghantam Amerika Serikat dan Negara-negara yang paling terindustrialisasi di dunia di tahun 1930 an, angka pengangguran mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuktikan bahwa anggapan tentang “full employment” dan tingkat produksi yang konstan itu tidak benar. Banyak yang berkesimpulan bahwa prediksi Karl Marx terbukti tepat. Namun para ekonom yang tidak seialiran dengan Marx mencoba untuk memecahkan problem

⁴⁷ Martin Bronfenbrenner, et.al., Op.Cit., hlm. 92.

⁴⁸ Ibid., hlm. 95.

pengangguran yang terus berlangsung tetapi banyak yang putus asa. Di tengah masa-masa sulit ini, seorang ekonom terkemuka Inggris John Maynard Keynes menghadirkan sebuah teori yang menerangkan sebab-sebab pengangguran dalam ekonomi kapitalis dan menyarankan langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil untuk meredakan permasalahan.⁴⁹ Akhirnya banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes dan membentuk kelompok yang disebut “Keynesian Economist”.⁵⁰

Keynes dalam memandang masalah mengatasi pengangguran berusaha menggabungkan antara pandangan Smith dan Marx di mana menurutnya perluasan produksi yang dapat membuka lapangan pekerjaan tidak hanya dapat dilakukan kelompok kapitalis, dan tidak hanya dengan menekankan prioritas kaum pekerja saja, tetapi pemerintah dapat melakukan kebijakan yang proporsional dalam mewujudkan kondisi full employment. Keynes berbeda dengan Adam Smith yang hanya menganggap pembangunan ekonomi dapat dilakukan oleh kelompok kapitalis (pengusaha/wiraswasta) saja dan juga berbeda dengan Karl Max yang hanya mementingkan para pekerja (kaum buruh). Teori ekonomi pembangunan ekonomi Keynes yang berusaha menggabungkan kedua paham teori pembangunan antara

⁴⁹ Ibid., hlm. 92

⁵⁰ M. Suparmoko, Op.Cit., hlm. 4.

kapitalisme dan sosialisme, menganggap penting peranan pemerintah untuk dapat memajukan perekonomian suatu negara melalui anggaran belanja negara, atau regulasi yang cenderung membela masyarakat atau pengusaha kecil, mekanisme pasar modal dan sebagainya.⁵¹

Resep Keynesian untuk mengurangi atau memberantas pengangguran agak sederhana yakni meningkatkan permintaan total agregat melalui peningkatan langsung pengeluaran pemerintah atau oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara tak langsung mendorong investasi swasta (misalnya tingkat bunga yang rendah pada pinjaman bisnis, kelonggaran pajak, bantuan-bantuan investasi). Sepanjang ada pengangguran dan kelebihan kapasitas dalam ekonomi, penawaran barang dan jasa akan merespon secara otomatis pada penawaran yang lebih tinggi. Sebuah keseimbangan baru akan tegak berdiri dengan income yang lebih banyak dan tingkat ketenagakerjaan yang lebih tinggi.⁵²

4. Teori Harrod-Domar

Setelah selesainya perang dunia kedua para ahli ekonomi di negara-negara industri mulai menaruh perhatian pada terhadap negara-negara sedang berkembang. Namun mereka tidak siap dengan perangkat konseptual yang memadai untuk menganalisis proses pertumbuhan ekonomi di

⁵¹ Akhmad Mahyudi, Op.Cit., hlm. 166.

⁵² Michael P. Todaro, Op.Cit., hlm. 251.

masyarakat yang sebagian besar petani, agraris yang dicirikan dengan ketiadaan struktur ekonomi modern. Muncul pandangan bahwa seluruh negara industri pernah menjadi masyarakat agraris yang terbelakang sehingga pengalaman historis mereka dalam mentransformasikan ekonomi mereka dari masyarakat miskin dengan nafkah pertanian menuju raksasa industri modern dapat menjadi pelajaran penting bagi negara-negara terbelakang di Asia, Afrika dan Amerika Latin.⁵³ Pandangan ini memunculkan teori pembangunan yang berpijak pada langkah-langkah pertumbuhan. Transisi dari keterbelakangan menuju kemajuan dapat didiskripsikan dalam tema rangkaian langkah yang mesti dilalui oleh semua negara. Negara-negara maju menurutnya telah melewati langkah “tinggal landas dalam pertumbuhan ekonomi mandiri”.⁵⁴ Salah satu trik mendasar dari pembangunan yang penting bagi tinggal landas adalah mobilisasi simpanan dalam negeri dan asing agar supaya membangkitkan investasi yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Mekanisme ekonomi di mana lebih banyak investasi mengakibatkan pertumbuhan lebih banyak ini didikripsikan dalam model pertumbuhan Harold-Domar.⁵⁵ Model ini dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi : Roy Harrod dan Evsey Domar di tahun 1940-an, yang secara pokok menerangkan hubungan

⁵³ Ibid., hlm. 71.

⁵⁴ Ibid., hlm. 71.

⁵⁵ Ibid., hlm. 72.

antara pertumbuhan dan pengangguran dalam masyarakat kapitalis maju yang akhirnya difokuskan pada peranan akumulasi modal dalam proses pertumbuhan. Model Harrod-Domar digunakan secara luas (bahkan mungkin digunakan secara berlebihan) di Negara berkembang untuk menguji hubungan antara pertumbuhan dan persyaratan-persyaratan capital.⁵⁶

Teori Harrod Domar mengawinkan fungsi pembentukan modal dari aliran klasik maupun Keynes. Kalau kaum klasik berpendapat bahwa pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat dan apabila itu bertambah akan berarti produksi dan pendapatan nasional akan meningkat dengan demikian perkembangan ekonomi akan terjadi, sedangkan Keynes berpendapat bahwa tingkat perkembangan ekonomi itu akan ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat dan bukan kepada kesanggupan alat-alat modal untuk memproduksi barang, maka Harrod Domar berpendapat bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, sekaligus juga

⁵⁶ Dwight H. Perkins, Steven Radelet dan David L. Lindauer, *Economics of Development*, Edisi VI, New York : W.W. Norton & Company, Inc., 2006, hlm. 110.

sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan model pertumbuhan Harrod-Domar, trik pertumbuhan ekonomi yang paling fundamental adalah menaikkan proporsi simpanan income nasional (tidak dikonsumsi). Halangan utama pembangunan menurut teori ini, adalah rendahnya tingkat pembentukan kapital baru di Negara-negara sedang berkembang.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi pengangguran dalam kerangka teori Harrod Domar lebih ditekankan pada penguatan modal dalam proses pembangunan. Semakin banyak investasi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi maka akan semakin banyak tenaga menganggur yang dapat terserap.

5. Teori Arthur Lewis

Teori pembangunan dengan model surplus tenaga kerja dua sector dikembangkan oleh Sir W. Arthur Lewis pada tahun 1955, yang menaruh perhatian khusus pada implikasi surplus tenaga kerja bagi distribusi income. Perhatiannya difokuskan pada hubungan antara industri/modern dan pertanian/tradisional.⁵⁹ Sir W. Arthur Lewis (1954)

⁵⁷ Bintoro Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, Op.Cit., hlm. 35.

⁵⁸ Michael P. Todaro, Op.Cit., hlm. 74.

⁵⁹ Dwight H. Perkins, Steven Radelet dan David L. Lindauer, Op.Cit., hlm. 137.

mendasarkan teorinya pada analisis hubungan antara dua sektor ini.⁶⁰

Lewis menganalisis ekspansi ekonomi dalam dua sektor: sektor kapitalis/modern dan sector non-kapitalis/tradisional.⁶¹ Sektor tradisional mencakup kegiatan pertanian rakyat maupun berbagai macam kegiatan informal dalam kawasan kota (bersifat *self-employment*) dan bersifat mempertahankan tingkat konsumsi. Sedangkan sektor modern mencakup tidak saja industri manufaktur melainkan juga pertanian, perdagangan, perkebunan dan pertambangan. Yang membedakan antara keduanya adalah bahwa dalam sektor tradisional kegiatan ekonomi berkisar pada upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan dalam sektor modern terdapat kegiatan produksi bersifat komersil dengan maksud untuk mendapat laba (*provit motive*).⁶²

Di sektor tradisional terjadi kelebihan tenaga kerja di pedesaan karena tingkat produksi masih terbatas (tanpa adanya pertambahan modal dan penggunaan teknologi) dan fungsi produksi mengalami law of diminishing return (hukum pertambahan hasil yang menurun), di mana upah tenaga kerja hanya sebesar rata-rata produktivitas para pekerja, karena

⁶⁰ Gerald M. Meier, Op.Cit., hlm. 120.

⁶¹ Gerald M. Meier, Op.Cit., hlm. 120-121.

⁶² Sumitro Djohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994, hlm. 93.

banyaknya pengangguran tersembunyi. Sedangkan di sektor industri modern terjadi kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja terjadi disebabkan oleh tambahan modal sebagai hasil akumulasi laba yang ditanamkan kembali atau diinvestasikan kembali di sektor industri. Dan sebagian hasil akumulasi, laba juga dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi yang mampu meningkatkan produksi dan kapasitas produksi. Perekonomian industry di perkotaan menurut Lewis mampu memberikan upah 30 % di atas upah pekerja di sector pertanian / perekonomian tradisional. Tingginya upah di sector industry perkotaan akan mampu menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga kerja di perkotaan.⁶³

Dengan demikian konsep Arthur Lewis untuk mengatasi pengangguran adalah dengan memperluas sektor modern yang membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat menarik kelebihan tenaga kerja yang ada di sektor tradisional. Tetapi pengalaman empiris di negara-negara berkembang menandakan betapa sulitnya untuk menyerap sejumlah penganggur dari sektor tradisional dan mengalihkannya secara permanen ke sektor modern sebagai angkatan kerja produktif. Proses demikian itu jauh dari lancar dan memerlukan waktu yang relatif lama.⁶⁴

⁶³ Akhmad Mahyudi, Op.Cit., hlm. 166-167.

⁶⁴ Sumitro Djohadikusumo, Op.Cit., hlm. 95.

Meskipun model pembangunan dua sector Lewis adalah sederhana dan kurang lebihnya cocok dengan pengalaman historis pertumbuhan ekonomi di Barat, namun asumsi-asumsinya tidak pas dengan kelembagaan dan realitas ekonomi kebanyakan negara-negara dunia ketiga kontemporer.⁶⁵ Akhmad Mahyudi menyebutkan beberapa kritik terhadap teori Arthur Lewis sebagai berikut:

- Menurut realitanya keuntungan/laba yang ditanamkan kembali dalam sektor industry oleh para pengusaha digunakan untuk menambah kapasitas mesin dan perkembangan teknologi, serta mengganti faktor produksi tenaga kerja manusia.
- Di negara-negara berkembang justru terjadi kelebihan tenaga kerja di daerah perkotaan, sedang di pedesaan terjadi kekurangan tenaga kerja.
- Upah-upah di negara berkembang tidak tetap, tetapi terus meningkat termasuk juga upah-upah di daerah pedesaan.
- Kemajuan teknologi agroindustri (pertanian dan peternakan) mampu meningkatkan hasil agroindustri yang tidak lagi tergantung pada musim, namun sesuai dengan permintaan pasar, atau penawaran hasil agroindustri sangat bersifat elastic terhadap harganya. Elastisitas penawaran

⁶⁵ Michael P. Todaro, Op.Cit., hlm. 79.

hasil agroindustri dapat menyamakan tingkat upah pedesaan dengan upah perkotaan.⁶⁶

Teori Arthur Lewis dalam menanggulangi pengangguran dengan cara memperbesar daya serap sector-sector industri terhadap kelebihan tenaga kerja di sector tradisional hanya dapat diterapkan pada negara-negara yang memiliki karakteristik kondisi yang sama dengan dengan yang dijelaskan dalam teorinya, tetapi tidak cocok diterapkan di negara-negara dengan latar belakang kondisi yang berbeda.

6. Teori dependensia

Teori dependensia berupaya menganalisis problem pengangguran sebagai indikasi keterbelakangan di negara-negara terbelakang. Oleh karena itu analisisnya mengarah kepada hubungan antara Negara-negara untuk melihat sejauh mana ketergantungan negara yang tergolong terbelakang terhadap Negara maju.

Pada tahun 1970 an, model-model ketergantungan internasional memperoleh dukungan yang meningkat khususnya di kalangan para intelektual dunia ketiga sebagai akibat dari kekecewaan model-model yang sudah ada sebelumnya. Secara esensial model ketergantungan internasional memandang bahwa negara-negara dunia ketiga diliputi oleh kekakuan institusi, politik dan ekonomi, baik

⁶⁶ Akhmad Mahyudi, Op.Cit., hlm. 167-168.

dalam negeri maupun internasional, dan ketergantungan serta dominasi dari negara-negara kaya. Keterbelakangan dengan demikian dipandang sebagai fenomena yang timbul secara eksternal akibat dominasi dan eksploitasi negara-negara kaya, dan bukan karena halangan internal seperti tabungan dan investasi yang tidak memadai atau pendidikan dan skill yang kurang. Perjuangan-perjuangan revolusioner atau paling tidak restrukturisasi utama dari sistem kapitalis dunia oleh karenanya dipersyaratkan untuk memerdekakan negara-negara dunia ketiga dari kontrol ekonomi langsung maupun tidak langsung dari dunia pertama mereka dan penindasan-penindasan domestik.⁶⁷

Teori dependensia dimunculkan dari hasil diskusi para ekonom yang berasal dari Amerika Latin yang kemudian menghasilkan deklarasi ekonomi Amerika Latin. Pencetus teori ini Paul Baran dan Andre Gunderfrank. Paul Baran menciptakan model dasar tesis alternatif mengenai keterbelakangan ekonomi yang terjadi di negara-negara dunia dan usaha menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi negara berkembang. Teori Dependensia menggunakan asumsi dari Andre Gunderfrank yang membagi peerekonomian menjadi dua, yaitu perekonomian negara-negara maju yang metropolis dan negara-negara sedang berkembang yang disebut negara satelit yang terbelakang.

⁶⁷ Michael P. Todaro, *Op.Cit.*, hlm. 82-83.

Menurut teori dependensia, negara satelit yang terbelakang persis seperti perekonomian tradisional Arthur Lewis, di mana hubungan masyarakat masih bersifat paternalistik (hubungan sosial yang masih mengacu pada tokoh panutan) dan sosial antara anggota masyarakat, sedang negara maju digambarkan seperti perekonomian industri Arthur Lewis, dimana perekonomiannya berciri sangat modern dengan system pasar telah berlaku dengan baik. Interaksi sosial dan hubungan paternalistik memudar dan diganti dengan sistem individualisme dan penyelesaian segala masalah melalui kontrak-kontrak.⁶⁸

Menurut teori dependensia, interaksi antara negara maju dan negara miskin bersifat eksploitatif yang menyebabkan negara-negara miskin semakin tergantung kepada negara maju. Paul Baran melihat investasi multinasional negara maju di negara miskin memang akan meningkatkan pendapatan nasional negara miskin tersebut, namun peningkatan pendapatan nasional ini tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat negara miskin, karena adanya kepincangan distribusi pembagian pendapatan nasional. Keuntungan yang diinvestasikan oleh pengusaha multinasional tersebut hanya dinikmati oleh pengusaha asing, dan segelintir anggota masyarakat tertentu (konglomerat seperti di Indonesia atau kelompok borjuis dalam teori

⁶⁸ Akhmad Mahyudi, Op.Cit., hlm. 168.

ekonomi sosialis). Paul Baran mengemukakan bahwa sistem hubungan paternalistik dan sosial masyarakat berubah menjadi sistem kapitalis yang didasarkan rasionalitas pasar dan dapat merupakan langkah utama dalam transformasi masyarakat menuju kemajuan seperti dialami Eropa Barat, namun penerapan komersial dalam hubungan sosial dan masyarakat feodal atau semifeodal justru menambah proses eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan sistem kapitalis yang tidak jarang diiringi perbuatan korupsi dan ketidakadilan dalam setiap tingkat struktur pemerintahan yang condong pada kepentingan pemilik modal.⁶⁹

Dengan demikian menurut teori dependensia untuk mengatasi pengangguran yang meningkat tajam di negara-negara berkembang adalah dengan cara-cara revolusioner yang dapat melepaskan ketergantungan negara-negara ini pada Negara-negara maju yang dipandang eksploitatif.

7. Teori Neoklasik Penentang Revolusi

Pada tahun 1980-an muncul teori pembangunan yang mencoba memperlunak teori pembangunan dependensia yang cenderung menggunakan cara-cara revolusioner dalam menyelesaikan masalah-masalah eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang yang bergantung

⁶⁹ Akhmad Mahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 168-169.

kepada negara-negara maju. Muncullah kemudian teori neoklasik penentang revolusi.⁷⁰

Jika dalam teori Harrod Domar dikemukakan bahwa tingkat pengeluaran akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi (selaras dengan Keynes), maka sebaliknya dalam aliran neo klasik dinyatakan bahwa hal tersebut tidak akan menentukan laju pertumbuhan. Menurut kaum neo klasik laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pendapat ini sepenuhnya berpangkal pada pikiran ekonomi klasik yang menyatakan bahwa “perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa”. Perbedaan lain dengan teori Harrod Domar adalah pendapat, bahwa bagi kaum Neo Klasik rasio modal produksi (capital output ratio) tidak konstan dan dapat dengan mudah mengalami perubahan, yang berakibat suatu perekonomian kemungkinan yang luas dalam menentukan gabungan modal dan tenaga kerja yang akan dipergunakan dalam menciptakan sejumlah produksi tertentu.⁷¹

Sesuai teori pertumbuhan neoklasik tradisional, pertumbuhan output diakibatkan oleh satu atau lebih dari tiga faktor : kenaikan dalam kuantitas dan kualitas tenaga kerja

⁷⁰ Akhmad Mahyudi, Op.Cit., hlm. 170.

⁷¹ Bintoro Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, Op.Cit., hlm. 36-37.

(melalui pertumbuhan penduduk dan pendidikan), kenaikan dalam kapital (melalui tabungan dan investasi, dan kemajuan teknologi. Ekonomi tertutup (yang tidak ada aktivitas eksternal) dengan angka tabungan yang lebih rendah (di mana yang lainnya sama) tumbuh lebih lambat dalam jangka pendek dari pada yang dengan angka tabungan tinggi dan cenderung bertemu dengan income per kapita lebih rendah. Ekonomi terbuka (yang dengan perdagangan, investasi asing, dan sebagainya), bagaimanapun mengalami pertemuan income pada level lebih tinggi sebagai aliran kapital dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin di mana rasio capital-tenaga kerja lebih rendah dan dengan demikian kembalian investasi lebih tinggi. Konsekuensinya, dengan menghalangi masuknya investasi asing, sesuai teori pertumbuhan neoklasik, akan memperlambat pertumbuhan dalam ekonomi-ekonomi dunia ketiga.⁷²

Dengan demikian cara efektif menanggulangi pengangguran menurut teori neo klasik adalah dengan upaya simultan yang tidak hanya memperbesar capital tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja yang diiringi kemajuan teknologi. Upaya ini akan lebih efektif menyemarakkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju kondisi full employment.

⁷² Michael P. Todaro, Op.Cit., hlm. 89.

Dapat digarisbawahi bahwa teori pengangguran atau kajian penanggulangan pengangguran pada dasarnya adalah kajian bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi pada tingkat full employem di mana semua sumber faktor produksi terfungsikan secara optimal di mana spenawaran tenaga sama dengan permintaan tenaga kerja sehingga tidak ada pengangguran yang membahwayakan selain pembpengangguran friksional. Kondisi menuju ini melibatkan berbagai macam teori pembangunan. Maka kajian menuju terselaisakannya masalah pengangguran berkaitan erat dengan teori-teori pembangunan.

Namun teori-teori yang terkait dengan pengangguran tersebut banyak dimunculkan sejak era industrialisassi di Barat, dan memunculkan teori-teori yang ternyata masih mengandung kelemahan terbukti dengan masih tetap kurang efektifnya teori itu. Teori-teori seluruhnya dibangun oleh ekonom barat sejak Adam Smith berdasarkan pengalaman historis barat dalam proses industrialisasi. Teori ini lahir dari dunia Negara maju yang bercirikan industri maju, yang cukup kurang memadai diterapkan di dunia yang berbeda. Misalnya teori Lewis yang cukup akurat dan logis merepresentasikan proses penyerapan kerja dalam masa transisi menuju masyarakat modern yang dialami Barat ternyata untuk kecocokan penerapannya di negara-negara berkembang dengan kondisi yang lain banyak dipertanyakan.

Pembangunan lima tahunan di Indonesia agaknya mengikuti langkah-langkah linier dalam pembangunan yang

antara lain dikemukakan oleh Harrod-Domar dan banyak berpijak pada pentingnya kapital sehingga hutang luar negeri membengkak. Ketika Indonesia gagal memasuki tinggal landas maka ini membuktikan bahwa mengikuti satu teori dengan tidak membuka diri pada teori lain dan kurang mengkomunikasikan diri dengan kondisi riil setempat dan pertimbangan lain tidak akan dapat menjamin pertumbuhan ekonomi menuju full employment dapat terwujud.

BAB III

KONSEP FAHIM KHAN TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI SURPLUS TENAGA KERJA

A. Sekilas tentang Fahim Khan dan Karya-karyanya

Muhammad Fahim Khan memiliki pengetahuan langsung dari tangan pertama tentang isu kebijakan yang dihadapi negara-negara Muslim dalam memperkenalkan sistem keuangan Islam pada ekonomi mereka. Ia banyak terlibat di bidang pengembangan dan aplikasi ekonomi dan keuangan Islam baik sebagai peneliti, pengajar maupun sebagai penasehat pemerintah di bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam selama 25 tahun terakhir.¹

Fahim Khan termasuk jajaran ahli ekonomi Islam kontemporer yang di samping memiliki kapabilitas yang handal secara akademis juga memiliki pengalaman praktis di bidang pengembangan ekonomi Islam. M. Fahim Khan memperoleh gelar B.A. and M.A. (di bidang ilmu Statistik) dari Universitas Punjab, Pakistan. Gelar M.A dan Ph.D. di bidang Ilmu Ekonomi diperolehnya dari Universitas Boston, Amerika Serikat. Ia bergabung dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI) sejak tahun 1988, menduduki berbagai posisi penting seperti Kepala Divisi Riset, Kepala Divisi Pelatihan, serta Kepala Divisi

¹ “Authors’ Biography”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-6, Number-2, hlm. 117.

Ilmu Ekonomi Islam, Kerjasama dan Pembangunan. Ia juga menjabat sebagai Direktur IRTI selama satu tahun.²

Sebelum bergabung dengan IRTI, ia bekerja di berbagai bidang pengajaran, riset dan posisi-posisi eksekutif pada Kementerian Perencanaan Pemerintah Pakistan, Universitas Islam Pakistan, Universitas King Abdulaziz Arab Saudi, Universitas Quaid-e-Azam Pakistan dan Islamic Foundation Inggris. Di Kementerian Perencanaan ia menjabat sebagai Kepala Deputi. Di Universitas Islam Internasional ia menjadi Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Direktur Pendidikan Ilmu Ekonomi. Ia juga menjadi Dosen Tamu di Universitas Quaid-e-Azam, Universitas King Abdulaziz dan Islamic Foundation. Ia menjadi perutusan Bank Negara (Bank Sentral Negara) Pakistan selama setahun sebagai Penasehat Transformasi Sistem Finansial (untuk disesuaikan dengan Syariah). Ia juga menjabat sebagai Kepala Pusat Bisnis Islam Riphah Universitas Internasional Riphah Islamabad Pakistan.³

Selama karier profesionalnya, Fahim Khan menggeluti berbagai bidang, antara lain bidang pembangunan ekonomi, perdagangan asing dan ekonomi internasional, keuangan dan perbankan, investasi dan analisis finansial, migrasi tenaga kerja internasional, ekonomi dan keuangan Islam, statistika dan ekonometrika. Ia juga memimpin berbagai uji coba terkait

² Lihat: Biodata of Dr. Fahim Khan – IRTI Publication, http://www.irtipms.org/Fahim%20Khan_E.asp, diakses 10 September 2014.

³ Ibid.

pengembangan model-model ekonometrika bagi perencanaan dan proyeksi ekonomi makro, juga memimpin riset terkait berbagai isu kebijakan ekonomi makro.⁴

M. Fahim Khan menulis 10 buku dan monografi di bidang ekonomi, perbankan dan keuangan Islam yang diterbitkan di Pakistan, Arab Saudi dan Inggris. Ia juga telah menulis lebih dari 11 karya yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah dan lebih dari 20 karya tersebar di berbagai buku dan proceeding seminar dan konferensi yang dipublikasikan di berbagai belahan dunia. Belum lagi berbagai laporan penelitian dan paper kebijakan yang diterbitkan untuk keperluan resmi selagi berkiprah di Kementerian Perencanaan Pakistan.⁵

Fahim Khan juga banyak berkiprah di berbagai organisasi akademik dan professional. Ia menjadi anggota Dewan Editor Institut Ilmu Ekonomi Pembangunan Pakistan, anggota Dewan Internasional Review Ilmu Ekonomi Islam (Inggris), anggota Dewan Gubernur Institut Perbankan dan Asuransi Islam (Inggris). Dia juga menjadi anggota Komisi Transformasi Sistem Finansial di Pakistan. Banyak paper yang ia presentasikan di berbagai seminar dan konferensi internasional. Dana-dana bantuan dari lembaga-lembaga internasional ia peroleh untuk proyek riset terkait migrasi tenaga kerja internasional dan untuk proyek yang lain terkait prosedur pembayaran dan saluran perdagangan

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

internasional. Ia juga menerima bantuan dana dari lembaga-lembaga nasional untuk riset kependudukan. Sebagai seorang akademisi, Fahim Khan telah banyak membimbing dan menguji berbagai tesis dan disertasi di berbagai universitas di Pakistan, Inggris, Australia, Malaysia dan Nigeria. Dia juga banyak merivew berbagai artikel jurnal internasional di bidang ekonomi dan keuangan.⁶

Di antara karya-karyanya adalah buku-buku dengan judul sebagai berikut:

1. "A Survey of Issues and Program for Further Research in Fiscal and Monetary Economics of Islam" diterbitkan atas kerja sama antara Universitas King Abdulaziz Jeddah dan Lembaga Studi Kebijakan, 1981, Islamabad (ditulis bersama Munawar Iqbal).
2. "Money and Banking in Islam" diterbitkan atas kerja sama antara Lembaga Studi Kebijakan Islamabad dan Universitas King Abdulaziz Jeddah, 1983 (diedit dengan Ziauddin Ahmed dan Munawar Iqbal).
3. "Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam" diterbitkan atas kerja sama antara Lembaga Studi Kebijakan Islamabad dan Universitas King Abdulaziz Jeddah, 1983 (diedit dengan Ziauddin Ahmed dan Munawar Iqbal).
4. "Distribution in Macroeconomics Framework: An Islamic Perspective," (Ed.) Universitas Islam Internasional Islamabad, 1988.

⁶ Ibid.

5. “Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques”, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, 1991.
6. “Human Resource Mobilization through Profit-Loss Sharing Based Financial System”, Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1991.
7. “Essays in Islamic Economics”, Islamic Foundation, Leicester, UK, 1994.
8. “Islamic Futures and their Markets”, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1995.
9. “Islamic Financial Institutions”, (Ed.) Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1995.
10. “Counter Trade - Policies and Practices in OIC Member Countries”, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1995.⁷

B. Kritik Fahim Khan terhadap Strategi Pembangunan Ekonomi Konvensional

Selepas dari penjajahan negara-negara Barat, negara-negara bekas jajahan berusaha keras menggalakkan pembangunan ekonomi masing-masing untuk secepat mungkin mengatasi berbagai persoalan ekonomi semisal kemiskinan dan pengangguran. Negara-negara ini banyak mengadopsi teori-teori

⁷ Ibid.

pembangunan yang banyak ditulis para ahli ekonomi modern, sebagaimana beberapa telah disebutkan dalam Bab II. Fahim Khan menyebutnya sebagai sebuah strategi konvensional untuk pembangunan ekonomi. Secara khusus strategi ini dipakai untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi negara-negara yang mengalami surplus tenaga kerja, seperti yang diadopsi di beberapa negara berkembang.⁸

Rasionalisasi strategi pembangunan ekonomi ini dicermati oleh Fahim Khan sebagai berikut:

1. Problem yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang adalah melimpahnya tenaga kerja, dengan upah yang sangat minim yang hanya sekedar dapat dipakai sebagai penyambung hidup (tingkat upah subsisten minimum). Banyak tenaga kerja menganggur di tengah belitan kemiskinan.
2. Realitas masalah ekonomi tersebut perlu direspon dengan pembangunan intensif guna menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor yang terorganisir secara modern untuk dapat menyerap seluruh surplus tenaga kerja. Ini perlu dilakukan untuk membawa negara menuju sebuah kondisi di mana perekonomian trtata seedemikian rupa dan terus bergerak dalam proses pembangunan berkelanjutan.
3. Untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dibutuhkan akumulasi modal yang menuntut mobilisasi tabungan. Kelas

⁸ Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995, hlm. 197.

pemodal (kapitalis) lebih dapat diharapkan dapat menabung dan berinvestasi lebih banyak daripada kelas pekerja/buruh. Oleh karena itu keuntungan usaha harus semakin meningkat untuk terus memperbesar investasi dari keuntungan tersebut.

4. Berbagai upaya untuk menaikkan keuntungan para pemodal (kapitalis) dilakukan antara lain melalui berbagai insentif fiskal dan moneter, serta menekan upah tetap pada tingkat minimal. Dengan melimpahnya tenaga kerja upah murah akan tetap diterima meski pada tingkat upah subsisten..
5. Investasi yang terus menerus dari keuntungan para pemodal akan menyebabkan perekonomian berada dalam suatu kondisi di mana semua kelebihan tenaga kerja terserap yang akan meningkatkan posisi tawar kalangan tenaga kerja sehingga kalangan pemodal (kapitalis) tidak dapat lagi mempertahankan upah pada tingkat subsisten minimum. Tekanan-tekanan dari sisi penawaran tenaga kerja akan memaksa tingkat upah tenaga kerja naik. Kondisi ini menjadi titik balik perekonomian atau dikenal dengan fase tinggal landas. Setelah tercapai titik balik ini, perekonomian sudah tertata secara dinamis terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang membuka lapangan kerja dengan tingkat upah yang terus naik.⁹

⁹ Fahim Khan, hlm. 197-198.

Strategi pembangunan sebagaimana digambarkan tersebut terfokus pada upaya memperluas kesempatan kerja agar secara cepat dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang berlimpah. Strategi tersebut dinilai Fahim Khan tidak berhasil memenuhi harapan mencapai titik balik atau tinggal landas sebagaimana direncanakan. Ia mencontohkan gagalnya penerapan strategi tersebut di Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan beberapa negara lainnya.¹⁰

Kegagalan strategi tersebut dalam penilaian Fahim Khan penyebabnya sederhana, yakni menyederhanakan strategi pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja hanya pada upaya pembangunan yang difokuskan pada percepatan penyerapan tenaga kerja dengan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan upah/gaji tetap.¹¹

C. Alokasi Surplus Tenaga Kerja dalam Ekonomi Islam Menurut Fahim Khan

Persoalan utama perekonomian negara padat penduduk adalah tingginya angka tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur. Sebagian besar penduduk yang mampu bekerja berada di luar pasar kerja atau berada di dalam pasar kerja tetapi tingkat upahnya sangat rendah. Permasalahannya terletak pada bagaimana mempekerjakan seluruh surplus sumber daya

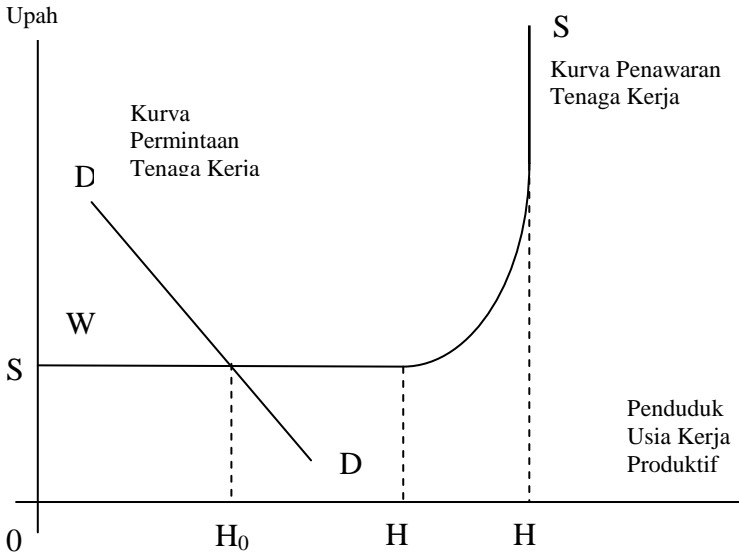
¹⁰ Ibid., h. 98.

¹¹ Ibid.

manusia untuk memperoleh hidup yang lebih baik dan dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masalah ini dibahas oleh teori ekonomi konvensional dalam topik yang berbicara masalah pembangunan ekonomi. Fahim Khan memberikan penjelasan teori ekonomi konvensional tersebut sebagai berikut: Melimpahnya sumber daya manusia yang tidak diimbangi sumber daya produktif lainnya menyebabkan upah tertahan pada tingkat yang sangat rendah. Kelangkaan sumber daya produktif lainnya menyebabkan sulit terciptanya lapangan kerja yang cukup bagi semua penduduk yang ingin bekerja sekalipun dengan upah yang rendah. Sejumlah besar sumber daya manusia yang menganggur memperbesar sisi penawaran tenaga kerja pada upah yang rendah ini.¹² Fahim Khan menjelaskan kondisi ini dengan gambar berikut:

¹² Ibid., h. 199-200.

Gambar 3.1 : Penawaran Tenaga Kerja¹³



SS adalah kurva penawaran tenaga kerja. DD menunjukkan permintaan tenaga kerja di sektor formal. H adalah stok total penduduk usia kerja produktif. H_1 adalah bagian dari total stok tenaga kerja (H) yang ingin dipekerjakan pada upah W yang merupakan upah pemesanan minimal dalam masyarakat bawah dimana tidak ada lagi yang ingin bekerja di sektor formal dengan upah di bawahnya. Di luar H_1 , hanya H_0 yang mendapatkan kerja

¹³ Ibid., hlm. 200.

pada upah W . H_0 H_1 adalah para penduduk yang ingin bekerja di upah W tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan, atau disebut dengan para penganggur. H_1 H adalah para penduduk yang tidak ingin bekerja di upah W . Mereka hanya akan mau mengambil pekerjaan hanya bila tingkat upah meningkat menyesuaikan harga penawaran mereka. Kelompok penduduk ini dalam terminologi ekonomi konvensional disebut "di luar angkatan kerja".¹⁴

Fahim Khan memperkirakan bahwa jumlah para penganggur (H_0 H_1) sulit terdeteksi dalam statistik di beberapa negara terbelakang yang memiliki tenaga kerja berlimpah. Ketika pertanyaan survei diajukan kepada mereka "Apakah Anda mencari pekerjaan?" Mereka mungkin menjawab: "Tidak." Sehingga H_0 H_1 kemudian diklasifikasikan sebagai "di luar angkatan kerja" atau masuk wilayah H_1 H padahal mereka menganggur. Realitanya mereka menjawab "Tidak idak mencari pekerjaan" karena mereka yakin tidak ada pekerjaan bagi mereka dengan upah pemesanan minimal. Mereka ini diasumsikan berada di daerah pedesaan di mana mereka memposisikan diri tidak mencari pekerjaan. Sebagian besar perempuan yang tercatat sebagai berada "di luar angkatan kerja" di beberapa negara berkembang juga mencerminkan fenomena tersebut. Banyak perempuan ingin mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat mengiringi

¹⁴ Ibid., hlm. 200-201.

meningkatnya permintaan tenaga kerja, namun mereka memosisikan diri mereka berada "di luar angkatan kerja".¹⁵

Fahim Khan mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif Islam. Menurutnya, dalam kerangka Islam orang-orang yang digolongkan sebagai para penganggur (H_0 H_1) masuk dalam kategori surplus tenaga kerja. Karena dalam perspektif Islam tidak ada sumber daya manusia yang dapat diasumsikan menganggur atau menganggur sukarela. Islam menganjurkan bahwa setiap sumber daya, baik tanah, tenaga kerja atau modal tidak boleh ada yang menganggur. Fahim Khan mendasarkannya pada beberapa hadis antara lain Nabi dilaporkan telah mengatakan bahwa Allah membenci orang-orang yang sehat baik fisik maupun pikirannya namun hanya duduk menganggur. Juga hadis yang menegaskan larangan mengemis yang dijadikan sebagai sebagai profesi dan ketergantungan pada orang lain tidak disukai oleh Nabi. Demikian juga Nabi memperingatkan kondisi kemiskinan harus diwaspadai karena dapat melemahkan agama dan menghancurkan martabat seseorang. Dalam kerangka ajaran Islam, setiap individu merasa memiliki keharusan sebagai seorang Muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi karena konsekuensi ajaran sebagai berikut:

1. Setiap Muslim tidak boleh memubazirkan sumber daya yang ada secara sia-sia, termasuk dirinya sendiri harus dapat memberi manfari manfaat atau nilai guna.

¹⁵ Ibid., hlm. 201.

2. Seseorang memiliki tanggung jawab menopang penghidupan dirinya sendirinya maupun keluarganya agar tidak tergantung pada orang lain.
3. Setiap individu dituntut memberi kontribusi untuk menolong orang miskin dalam masyarakat.
4. Setiap Muslim dituntut untuk dapat berkontribusi/infaq atau menyediakan sumber daya bagi kepentingan dakwah Islam.¹⁶

Dengan kerangka ajaran Islam tersebut, setiap penduduk berbadan sehat yang berada dalam usia kerja terdorong dan berkemauan keras untuk mencari aktivitas ekonomi yang tepat untuk ia kerjakan. Kondisi yang demikian menjadikan seluruh penduduk H_0H_1 dapat dianggap sebagai surplus tenaga kerja, bukan penganggur. Dengan keterbatasan permintaan tenaga kerja pada DD, maka semua H_0H_1 menjadi sumber daya manusia yang secara potensial mencari kegiatan kewirausahaan karena mereka tidak punya pilihan lain hingga ada tersedia kesempatan kerja yang dapat mempekerjakan mereka pada tingkat upah yang mereka kehendaki.¹⁷

Dalam kerangka ini, tujuan pembangunan nasional seharusnya untuk menghasilkan peluang-peluang yang pertama kali menyerap surplus sumber daya manusia menuju ke titik balik

¹⁶ Ibid., hlm. 201-202.

¹⁷ Ibid..

atau tinggal landas, setelah itu surplus sumber daya manusia yang tersisa menjadi terdorong untuk terserap ke dalam sistem.¹⁸

Semua sumber daya manusia yang berada di luar H_0 (yang secara konvensional disebut menganggur) pada tingkat upah pemesanan atau harga penawaran sebesar W yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan pada upah ini, memiliki kemauan keras untuk bekerja. Jika pekerjaan berupah tidak tersedia bagi mereka, maka mereka berpikir untuk memulai sebuah proyek/usaha sendiri yang bisa menghasilkan keuntungan yang diharapkan sama atau lebih besar dari W , dengan kata lain mereka adalah para wirausahawan potensial yang ingin memulai usaha/proyek. Ketika mereka berhasil memperoleh kesempatan wirausaha, yang bekerja bukan hanya diri mereka sendiri tetapi juga melibatkan orang lain. Mereka menciptakan permintaan sumber daya manusia lainnya untuk ikut bergabung, baik sebagai mitra berbagi hasil atau sebagai tenaga kerja yang diberi upah.¹⁹

D. Strategi Islami Pembangunan Ekonomi dalam Pandangan Fahim Khan

Menurut Fahim Khan solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja memang dapat ditangani melalui dua strategi. Pertama strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. Kedua, strategi menciptakan peluang kewirausahaan. Sayangnya

¹⁸ Ibid., hlm. 202.

¹⁹ Ibid.

strategi pembangunan ekonomi padat penduduk dalam kerangka konvensional hanya memfokuskan pada strategi yang pertama, yaitu berupaya dengan berbagai cara untuk menciptakan kesempatan kerja berupah tetap bagi tenaga kerja secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Strategi ini membutuhkan para kapitalis untuk berinvestasi memperluas lapangan pekerjaan. Para kapitalis ini cenderung memakai surplus sumber daya manusia untuk dipekerjakan bukan untuk dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan. Strategi konvensional ini cenderung mengabaikan strategi penciptaan peluang kewirausahaan sebagai solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja.²⁰

Secara umum kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang masih rendah, baik dari sisi pendidikan maupun skill manajemen kewirausahaannya. Memberikan peluang wirausaha kepada mereka bukan berarti menyediakan pabrik besar atau toko besar untuk dikelola. Memberikan peluang kewirausahaan berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan usaha yang dapat mereka kelola sendiri. Misalnya membuka peluang atau memfasilitasi mereka yang memiliki ketrampilan dasar entah sebagai tukang kayu, penjahit, tukang bangunan, tukang bikin makanan kecil dan sebagainya untuk mendirikan unit manufaktur kecil yang mempekerjakan beberapa orang saja yang mungkin anggota keluarganya sendiri. Kesuksesan usaha bukan milik mereka yang

²⁰ Ibid., hlm. 198.

berpendidikan tinggi saja, tidak jarang ada orang yang buta huruf dan tidak berpendidikan sukses menjalankan usaha kecil – usaha kecil dengan penghasilan yang tidak kalah dari gaji tetap pegawai atau karyawan. Bahkan dewasa ini banyak diwacanakan dalam beberapa literatur tentang pentingnya pengembangan industri skala kecil.²¹

Fahim Khan mengambil contoh kasus di Pakistan dan Indonesia sebagai negara dengan kondisi ekonomi berlimpah tenaga kerja. Di negara-negara ini orang menganggur bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan sesuai apa yang mereka bisa kerjakan. Dengan pendapatan perkapita yang masih rendah, tentu orang-orang ini memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan bekerja. Ketika tidak ada penawaran pekerjaan, mereka tidak dapat menjalankan bisnis atau usaha mandiri karena tidak memiliki modal sendiri. Pada umumnya Negara dengan surplus tenaga kerja, sebagian besar sumber daya manusianya tidak memiliki modal. Mereka membutuhkan pinjaman modal jika ingin melakukan usaha mandiri.²²

Strategi membuka peluang kewirausahaan bagi surplus sumber daya manusia memerlukan beberapa prasyarat sebagai berikut:

²¹ Ibid.

²² Ibid., 198-199.

- a. Ketersediaan modal yang diperlukan oleh surplus tenaga kerja dalam memulai usaha mandiri.
- b. Adanya sistem yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha.
- c. Adanya sistem penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usahahingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta.²³

Ketiga prasyarat tersebut dipakai Fahim Khan untuk memperbandingkan antara sistem konvensional berbasis bunga dengan sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil dalam mensupport strategi menciptakan peluang kewirausahaan.

Sistem ekonomi non-Islam yang berbasis bunga dinilai tidak berhasil mewujudkan prasyarat-prasyarat di atas terutama di negara-negara berkembang yang berpenduduk padat. Sistem berbasis bunga dipandang tidak menyediakan modal yang dibutuhkan oleh calon wirausahawan potensial yang akan memulai usaha. Sistem ini lebih tertarik untuk membiayai usaha mapan yang dapat memastikan terhindar dari kredit macet dan berbagai resiko pembiayaan. Pengajuan pembiayaan oleh orang baru akan memulai usaha biasanya menuntut dipenuhinya persyaratan yang sulit termasuk jaminan yang kadang tidak dapat dipenuhi oleh calon pelaku usaha. Dalam kondisi ini tentu ia akan lebih memilih

²³ Ibid., h. 199.

untuk mencari kerja berupah tetap dari pada melakukan usaha mandiri yang sulit dan beresiko.²⁴

Sedangkan sistem ekonomi Islam berpotensi dapat menyediakan prasyarat-prasyarat strategi membuka peluang wirausaha di atas sehingga tercipta suatu kondisi di mana setiap individumemiliki alternatif yang sama untuk memilih pekerjaan berupah tetap ataukah memilih untuk membuka usaha mandiri memanfaatkanpeluang bisnis. Fahim Khan menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam dengan surplus tenaga kerja, pembangunan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau lapangan usaha yang sesuai bagi surplus tenaga tersebut.²⁵

Fahim Khan meyakini bahwa institusi ekonomi Islam memiliki pengaruh kuat untuk menciptakan dan mendorong kegiatan kewirausahaan dalam perekonomian. Ia menguraikan bukti dan alasan sebagai berikut:

Pertama, tidak sebatas seruan moral, Islam juga mengatur agar tidak ada sumber daya (baik manusia atau fisik) yang terus menganggur. Fahim Khan menguatkannya dengan tradisi-tradisi Nabi yang secara jelas menunjukkan bahwa sumber daya diperlukan untuk dimanfaatkan secara produktif. Ia mencontohkan salah satu tradisi Nabi berkaitan dengan orang miskin yang datang kepada nabi meminta sedekah. Nabi tidak serta merta memberikan orang tersebut sedekah, tetapi beliau mengupayakan agar tersedia

²⁴ Ibid., hlm. 199-200.

²⁵ Ibid., hlm. 200-202..

kapak dan seutas tali bagi orang tersebut untuk digunakan bekerja memotong kayu dan menjualnya di pasar. Setelah beberapa hari, orang tersebut melaporkan bahwa dirinya secara ekonomi menjadi lebih baik lebih baik dan tidak lagi membutuhkan sedekah.²⁶

Fahim Khan memaknai tradisi Nabi tersebut sebagai berikut:

1. Seseorang yang berbadan sehat memiliki keharusan bekerja tidak diperkenankan duduk-duduk saja dan hidup menggantungkan sedekah. Dalam tradisi Nabi di atas sebenarnya tidak sulit bagi nabi untuk langsung memberi sedekah pada peminta-minta tersebut.
2. Orang yang menganggur diminta untuk terlibat dalam kegiatan usaha mandiri/ wirausaha bukan dalam pekerjaan dengan upah tetap. Dalam tradisi Nabi di atas sebenarnya tidak sulit bagi Nabi untuk meminta beberapa orang kaya untuk mempekerjakan peminta-minta tersebut. Beliau memutuskan lebih tepat menyuruh orang yang menganggur tersebut melibatkan diri dalam kegiatan usaha mandiri/wirausaha daripada memberi pekerjaan baginya.²⁷

Kedua, ada pengaturan institusional yang memaksa salah satu sumber daya yang langka dalam perekonomian (yakni modal finansial) untuk aktivitas kewirausahaan dari pada disewakan untuk memperoleh sewa modal. Fahim Khan menegaskan bahwa modal keuangan dilarang keras untuk memperoleh sewa, yaitu

²⁶ Ibid., h. 202-203.

²⁷ Ibid., hlm. 203.

bunga. Satu-satunya cara agar modal keuangan dapat menghasilkan pendapatan adalah dengan melibatkannya dalam aktivitas kewirausahaan di mana keuntungan yang akan diperoleh merupakan imbalan resiko kerugian produktif. Membiarkan modal finansial menganggur juga tidak disukai. Ada beban pungutan zakat atas sumber daya jika tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan produktif.²⁸

Ketiga, dorongan bagi sumber daya keuangan untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan akan menciptakan permintaan terhadap sumber daya komplementer untuk dipekerjakan pada basis wirausaha yang memakai modal finansial tersebut. Modal finansial tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa melibatkan sumber komplementer. Sumber daya komplementer yang terbaik adalah sumber daya manusia, terutama ketika sumber daya manusia ini sangat banyak sehingga modal finansial dapat menegosiasikan rasio bagi-hasil yang lebih baik. Dengan demikian, pengaturan institusional Islam seperti ini tidak hanya memaksa sumber daya finansial untuk menjadi sumber daya wirausaha, tetapi juga menciptakan permintaan sumber daya manusia.²⁹

Keempat, pengaturan institusional terkait jaminan sosial dan tidak adanya bunga pada modal finansial akan mendorong sumber daya manusia dalam perekonomian Islam untuk lebih mencari

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., hlm. 203-204.

aktivitas kewirausahaan dari pada pekerjaan dengan upah tetap. Pada dasarnya aktivitas kewirausahaan menyediakan lebih banyak peluang pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pekerjaan upah tetap. Orang akan termotivasi untuk memaksimalkan pendapatan hari ini dan masa mendatang. Orang akan lebih memilih kegiatan kewirausahaan dari pada pekerjaan berupah tetap ketika risiko wira usaha tidak lebih berat pendapatan yang diharapkan.³⁰

Dalam ekonomi konvensional berbasis bunga, yang dipertaruhkan dalam sebuah aktivitas kewirausahaan jauh lebih berat dari pada pekerjaan berupah tetap. Risiko berwirausaha dalam ekonomi berbasis bunga meliputi seluruh upaya manusia diinvestasikan, seluruh modal keuangan yang diinvestasikan, serta bunga yang harus dibayarkan atas modal keuangan. Seorang wirausahawan yang melakukan usaha bukan dengan modal sendiri ketika mengalami kerugian menanggung beban yang amat berat. Dia harus mengembalikan modal pinjaman dengan seluruh bunganya. Dia juga menghadapi bahaya kelaparan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Melihat beratnya risiko tersebut, pekerjaan yang berupah tetap yang menjamin paling tidak kebutuhan dasar kehidupan (subsistensi) akan selalu lebih disukai.³¹

³⁰ Ibid., h. 204.

³¹ Ibid.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang secara institusional menjamin kebutuhan hidup minimal dan melarang bunga, individu yang berwirausaha menghadapi risiko yang jauh lebih sedikit. Risiko akan dibagi antara pelaku wira usaha dan pemilik modal finansial. Risiko finansial bahkan ditanggung sepenuhnya oleh para pemilik modal finansial. Ketika terjadi kerugian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal. Pelaku usaha sudah mempertaruhkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Ketika terjadi kebangkrutan usaha, tidak ada ketakutan kelaparan karena masyarakat menjamin kebutuhan pokoknya. Dalam suasana yang demikian, sumber daya manusia akan lebih tertarik mencari kegiatan kewirausahaan dari pada pekerjaan dengan upah tetap. Mereka akan memiliki pekerjaan tetap sebatas sampai mereka dapat menemukan modal finansial yang diperlukan untuk memulai kegiatan kewirausahaan.³²

Dari analisis Fahim Khan tersebut, ia menyimpulkan bahwa dalam kerangka kelembagaan dan kerangka etis ekonomi Islam, yang lebih dipromosikan adalah wirausaha daripada sewa tenaga kerja berupah tetap. Sistem ini menciptakan penawaran sekaligus permintaan wirausahawan dalam ekonomi. Semakin banyak wirausaha dipromosikan, semakin banyak upaya berbagi risiko produktif dan semakin banyak pula terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi.³³

³² Ibid., hlm. 204-205.

³³ Ibid.

Fahim Khan membantah adanya anggapan bahwa akumulasi modal dalam ekonomi Islam lebih lambat dibandingkan dalam ekonomi berbasis bunga. Ia bahkan mengemukakan beberapa alasan untuk meyakinkan bahwa akumulasi modal akan lebih tinggi dalam ekonomi Islam. Ia mengutip paper penelitian yang menyatakan bahwa:

1. Dalam Islam tidak ada larangan memperoleh pendapatan asalkan diperoleh melalui sumber-sumber dibolehkan. Dorongan untuk berinfaq karena Allah memberi tambahan motivasi yang tidak ada dalam system ekonomi lain. Salah satu contohnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 39. Ditegaskan bahwa bukan bunga akan tetapi zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Ada beberapa pembatasan konsumsi terutama pada konsumsi berlebih-lebihan yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pola konsumsi masyarakat modern.
3. Fakta bahwa akan ada lebih banyak pengusaha dalam perekonomian Islam menunjukkan bahwa akan lebih banyak tabungan/investasi dari pendapatan/laba yang lebih tinggi dari pada dalam ekonomi berbasis bunga. Dalam ekonomi Islam, pengusaha memiliki peluang untuk lebih banyak menabung untuk memperbesar usaha mereka dari pada yang bisa dilakukan oleh sedikit pengusaha dan sejumlah besar pekerja yang diupah dalam ekonomi berbasis bunga. Insentif untuk menabung di kalangan penerima upah tidak sebanyak di

kalangan para pengusaha. Tingkat bunga atas tabungan tidak cukup memberi insentif khususnya ketika tingkat inflasi sama atau lebih tinggi dalam perekonomian.

4. Semua tabungan akan diarahkan untuk dalam rangka akumulasi modal atau jika tidak demikian maka akan menghadapi penipisan setiap tahun oleh pungutan zakat sebesar 2,5 persen.³⁴

Karena dasar-dasar pembangunan dalam ekonomi Islam dilaksanakan melalui peyemaranan aktivitas wira usaha, maka pasokan modal untuk para wira usahawan prospektif berbasis bagi hasil/rugi merupakan bagian dari proses dalam mekanisme untuk menghasilkan para wira usahawan dalam perekonomian. Sedangkan dalam ekonomi berbasis bunga, proses pembangunan pada dasarnya dilakukan melalui akumulasi modal. Namun akumulasi modal ini tidak dirancang untuk menghasilkan lebih banyak wirausahawan. Mereka yang sudah memiliki modal diasumsikan lebih mampu dalam akumulasi modal. Ada mekanisme yang terbangun dalam sistem yang dapat menjamin pembangkitan akumulasi modal dalam sistem ekonomi berbasis bunga.³⁵

Fahim Khan mengasumsikan strategi pembangunan dalam kerangka institusi kapitalis di negara sedang berkembang yang padat penduduk. Stok tenaga kerja yang berlebihan akan

³⁴ Ibid., h. 205.

³⁵ Ibid., h. 205-206.

memasuki angkatan kerja ketika dapat terserap ke dalam sektor berupah dengan tingkat upah yang mulai naik. Sumber daya manusia ini umumnya tidak memiliki faktor-faktor produksi lain kecuali modal manusia yakni diri mereka sendiri. Tidak ada kerangka institusional yang dapat menyediakan bagi mereka sumber daya komplementer (sumber daya finansial/fisik) untuk memulai usaha sendiri. Kurang tersedia peluang kewirausahaan yang cukup untuk mengawali usaha sendiri semisal mengumpulkan kayu dari hutan dan menjualnya di pasar.³⁶

Tidak akan ada suplai modal finansial untuk kewirausahaan kecuali jika ada jaminan kepastian bahwa laba atas investasi lebih tinggi dari bunga. Seseorang yang membutuhkan modal finansial untuk memulai sebuah proyek akan harus membayar bunga tetap terlepas dari kondisi usahanya untung atau kerugian. Taruhannya terlalu banyak: kehilangan semua usaha manusia yang diinvestasikan dalam proyek, keharusan menutup hilangnya modal untuk mengembalikan pinjaman secara penuh, serta keharusan membayar bunga.³⁷

Sistem perbankan menawarkan modal finansial untuk mereka yang sudah memiliki modal. Lebih banyak modal yang dimiliki seseorang, semakin banyak pinjaman modal yang dapat diperolehnya dari bank. Sistem perbankan justru kontraproduktif

³⁶ Ibid., h. 206.

³⁷ Ibid.

terhadap upaya mendukung kelebihan pasokan sumber daya manusia untuk mencari kegiatan usaha mandiri produktif. Mereka yang memiliki sumber daya keuangan lebih memilih untuk menabungnya di bank untuk mendapatkan sewa uang yang tetap daripada menggunakan sumber daya finansial tersebut dalam kegiatan kewirausahaan mereka sendiri atau untuk dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan orang lain, kecuali jika mereka yakin akan keuntungan yang lebih tinggi dari suku bunga.³⁸

Dari penjelasan di atas, Fahim Khan menggarisbawahi bahwa proses pembangunan dalam ekonomi Islam dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pertama, mengembangkan kerangka institusi Islam terutama penggantian sistem bunga dengan sistem bagi untung/rugi serta jaminan sosial untuk menjamin penyediaan kebutuhan minimum untuk semua.
2. Dalam perekonomian di mana salah satu sumber daya (sumber daya manusia) sangat melimpah, dan sumber daya lainnya (modal fisik atau finansial) sangat kurang, sumber daya langka jelas akan memperoleh harga sewa yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika sumber daya keuangan secara ketat dilarang untuk mendapatkan bunga, akan lebih menguntungkan untuk mengkonversi sumber daya keuangan tersebut menjadi sumber daya fisik yang dapat disewakan daripada mencari keuntungan dengan bergabung dalam kegiatan kewirausahaan.

³⁸ Ibid., hlm. 207.

Dibutuhkan waktu sangat lama untuk mencapai kondisi di mana nilai sewa modal menurun ke tingkat di mana menjadi lebih menguntungkan untuk bergabung dengan kegiatan kewirausahaan sumber daya manusia dari pada menyewakan modal finansial atau fisik. Oleh karena itu Fahim Khan menyarankan adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga sewa modal fisik tidak mengalami kenaikan melampaui tingkat yang ditentukan oleh profitabilitas modal dalam kegiatan kewirausahaan.³⁹

Fahim Khan berkali-kali menegaskan kejelasan strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam yang menekankan lebih pentingnya pengaturan institusional untuk secara langsung melibatkan orang dalam kegiatan kewirausahaan mereka sendiri daripada strategi memanjakan kapitalis untuk menciptakan kesempatan kerja dengan upah pasti di pasar kerja. Ekonomi Islam memiliki mekanisme *built-in* untuk mendukung strategi tersebut. Mekanisme yang sudah *built-in* ini dapat lebih diperkuat dengan langkah-langkah berikut:

1. Kemampuan kewirausahaan adalah modal sumber daya manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan yang tepat. Perencanaan pendidikan yang tepat dapat berkontribusi banyak untuk mengurangi risiko wirausaha dengan terciptanya iklim sosial yang kondusif serta kesadaran bersama untuk mentaati segala aturan main. Tidak hanya pendidikan komersial,

³⁹ Ibid., hlm. 207-208.

pendidikan Islam memiliki peranan penting yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan iklim sosial yang mendukung bisnis konstruktif serta menanamkan etika dan moral masyarakat.

2. Perluasan akomodasi finansial melalui sistem perbankan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi sumber daya manusia enterprener. Efisiensi sistem perbankan dalam menyediakan pembiayaan tersebut dalam kerangka Islam mempersyaratkan reformasi substansial tidak hanya dalam struktur perbankan yang ada, tetapi pada seluruh sektor fiskal dan moneter. Dalam kerangka Islam, bank dan lembaga keuangan seharusnya diminta untuk menawarkan akomodasi keuangan hanya untuk pengusaha. Pinjaman konsumtif dari perbankan komersial hampir tidak ada karena pinjaman ini harus berupa qardl hasan (pinjaman tanpa bunga atau tanpa bagi hasil)
3. Institusi Islam hisbah harus dihidupkan kembali untuk mengawasi secara efektif norma-norma keadilan sosial ekonomi dalam perekonomian. Harga, sewa, alat-alat produksi, struktur produksi, struktur upah, pasar dan fungsinya, dan sebagainya, semua masuk dalam lingkup pengawasan lembaga ini.⁴⁰

⁴⁰ Bid., hlm. 208.

E. Model Makro Ekonomi Fahim Khan tentang Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Bebas Bunga

Terkait dengan strategi pembangunan dalam kerangka Islam, Fahim Khan menekankan bahwa pertumbuhan dalam ekonomi Islam dapat dimanipulasikan pada sisi penawaran dengan memobilisir sumber daya manusia sesuai kekhasan sistem keuangan Islam. Fahim Khan mengembangkan model makro untuk menunjukkan bahwa sistem finansial Islam membangkitkan kerangka makro secara implisit yang menuntun ekonomi menuju full employment (penggunaan tenaga kerja penuh) dan mempertahankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.⁴¹

Model Fahim Khan mengasumsikan suatu kondisi ekonomi dengan sumber daya manusia menganggur, penawaran output bersifat elastis dan semua harga tetap konstan. Penawaran agregat bagi output dan juga kurva penawaran tenaga kerja adalah horizontal, di mana ada sejumlah besar stok tenaga kerja. Fahim Khan mengasumsikan sebuah ekonomi tipe Arthur Lewis. Ada surplus tenaga kerja yang tersedia dengan suplai elastis yang hampir tidak terbatas pada tingkat upah yang konstan (W).⁴²

Fahim Khan membagi penduduk aktif secara ekonomi kedalam dua kategori: Pertama, mereka yang bekerja sebagai enterpreneur untuk mendapat keuntungan bagi diri mereka sendiri.

⁴¹ Ibid., h. 212.

⁴² Ibid.

Kedua, mereka yang bekerja sebagai “buruh” bagi orang lain untuk mendapatkan upah atau gaji. Oleh karenanya ia membuat persamaan $H = E + L$. Di mana H adalah stok sumber daya manusia yang aktif secara ekonomi. E adalah proporsi H yang aktif sebagai entrepreneur yakni yang bekerja untuk profit (yang tidak pasti). Sedangkan L meliputi mereka yang bekerja untuk/orang/pihak lain dengan upah dalam sektor modern ataupun mereka yang “menganggur secara tersembunyi” dalam sector penghidupan sederhana (subsisten). Dengan demikian ada tipe L , yakni mereka yang bekerja di sektor modern (L_1) dan mereka yang bekerja di sektor subsisten/tradisional (L_2). L_2 kebanyakan menganggur secara tersembunyi dalam arti bahwa ketika mereka keluar dari sektor tradisional ini tidak akan mempengaruhi output sektor tersebut.⁴³

Output dimana L_2 ikut andil dalam sektor tradisional adalah produk rata-rata sektor tersebut. Produk rata-rata ini menentukan dasar upah minimum yang dituntut L_1 dalam sektor modern. Fahim Khan menyebutnya W yang diasumsikan tetap konstan selama ada stok surplus tenaga kerja di sektor tradisional. Pekerjaan para pekerja di sektor modern (L_1) dibangkitkan oleh permintaan tenaga kerja dari entrepreneur (E), yang tergantung pada dua hal: produktivitas marjinal tenaga kerja dan pemesanan upah W . Sedangkan rekrutmen sumber daya manusia (H) kedalam E tergantung pada :

⁴³ Ibid., h. 212-213.

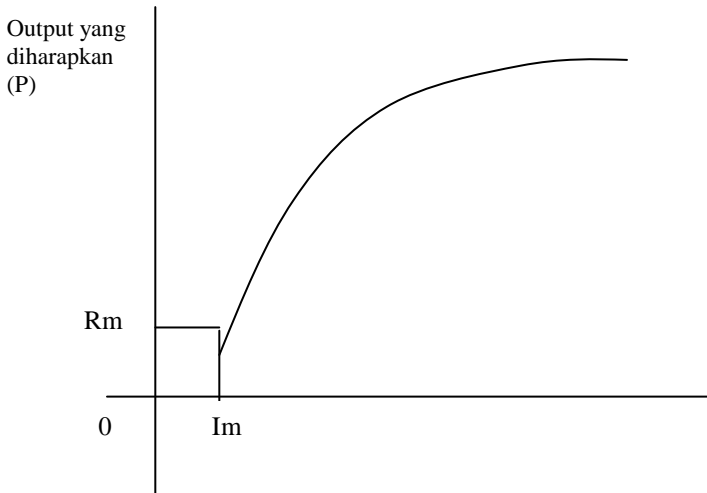
1. Kesempatan yang tersedia untuk bekerja bagi diri mereka sendiri / wira usaha
2. Profit yang diharapkan dari aktivitas kewirausahaan
3. Ketersediaan modal yang dipersyaratkan bagi aktivitas wira usaha
4. Keinginan dan kemampuan mereka untuk berwira usaha.⁴⁴

Karena ada jaminan upah (W) di sektor subsisten, maka sumber daya manusia (H) akan mengambil kerja kewirausahaan hanya jika memberi jaminan mereka profit minimum yang pasti (P). Pemesanan profit yang diharapkan ini adalah sebuah fungsi W , dimana $P = F(W)$. Profit yang diharapkan (P) yang dimungkinkan diperoleh dari kesempatan kewirausahaan ini memotivasi sumber daya manusia untuk mengorganisir kewirausahaan yang ketika dimulai akan segera membangkitkan permintaan terhadap tenaga kerja (L_1). Mungkin juga ada persyaratan modal minimum untuk membangkitkan pemesanan minimum akan profit P yang diharapkan. Semakin banyak modal tersedia bagi entrepreneur, semakin banyak pula profit (P) yang ia harapkan dapat diperoleh. Entrepreneur akan melakukan aktivitas wira usaha potensial sebagaimana diilustrasikan Fahim Khan dalam gambar berikut:⁴⁵

⁴⁴ Ibid., hlm. 213-214.

⁴⁵ Ibid., hlm. 214-215

Gambar 3.2 : Tingkat Investasi yang Dilakukan



R_m adalah Output minimum yang diharapkan yang bisa memotivasi sumber daya manusia yang khas untuk mengambil tindakan wira usaha. Sedangkan I_m adalah Tingkat minimal investasi yang dipersyaratkan untuk membangkitkan profit R_m dalam aktivitas wira usaha. Kurva menunjukkan output marginal pada investasi terus menurun seiring lebih banyak dana yang digunakan oleh entrepreneur yang sama.⁴⁶

Berlakunya model makro ekonomi sebagaimana diidealkan Fahim Khan tersebut memerlukan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Penabung dan entrepreneur adalah agen yang berbeda. Penabung adalah para pemilik dan penyedia dana investasi dan entrepreneur adalah para pemakai dana-dana ini.

⁴⁶ Ibid.

- b. Tidak ada biaya yang dipungut atau keuntungan yang diperoleh oleh lembaga intermediasi keuangan.
- c. Tidak ada dana yang tersedia yang berbasis bunga.
- d. Para pemilik dana dapat mensuplai dana untuk para entrepreneur hanya dengan basis bagi hasil. Dengan peraturan ini para pemilik dana setuju untuk berbagi profit yang aktual sesuai rasio yang disetujui sebelumnya dan juga berbagi kerugian (jika ada) menurut porsi dana yang mereka investasikan untuk usaha tersebut. Jika entrepreneur tidak memiliki investasi dana yang dimilikinya, semua kerugian ditanggung pihak penyedia dana.
- e. Ada pajak atas kepemilikan saldo uang atau asset tertentu yang dapat diinvestasikan atau dapat tumbuh atau dapat menghasilkan pendapatan. Pajak dinaikkan pada fase permulaan pembangunan jika uang atau asset dipinjamkan untuk pendapatan yang potensial atau rendah menghidupi entrepreneur. (sebagaimana ekonomi yang tumbuh, pinjaman untuk entrepreneur bisa kena pajak).⁴⁷

Dapat digarisbawahi bahwa konsep Fahim Khan tentang formulasi Islam tentang strategi pembangunan ekonomi di negara-negara yang mengalami surplus tenaga kerja tersebut mengasumsikan kondisi-kondisi ideal sebagaimana yang ia gambarkan dari aturan-aturan normatif ekonomi Islam. Poros dari aturan normatif yang ia jadikan prinsip dasar adalah prinsip bagi

⁴⁷ Ibid., hlm. 214-215.

hasil dan prinsip anti riba (bunga) sebagai fondasi bangunan ekonomi Islam. Oleh karena itu analisis lebih lanjut dari gagasan Fahim Khan tersebut disamping menguak substansinya, latar belakang metodologinya juga perlu dikuak keterkaitannya dengan upaya-upaya pengembangan perbankan syariah.

BAB IV

KONSEP FAHIM KHAN DALAM DISKURSUS EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

A. Latar Belakang Konsep Fahim Khan dan Pendekatan yang dipakai

Tulisan Fahim Khan dilatarbelakangi oleh pengamatannya terhadap kegagalan strategi pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang mengadopsi teori-teori pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh ahli ekonom barat. Ia secara khusus menyebut Indonesia, Banglades dan Pakistan. Dalam kasus di Indonesia misalnya, strategi pembangunan yang dipakai adalah strategi neoklasik yang diusung oleh Robert Solow, Paul samuelson dan juga Milton Friedmann. Strategi ini menitik beratkan pada pembangunan berpola industrialisasi secara besar-besaran dengan keyakinan akan adanya trickle down effect (efek rambatan) yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Strategi ini dibuktikan dengan suksesnya Program Marshall Plan dalam rekonstruksi negara-negara Eropa Pasca Perang Dunia II.¹

Fahim Khan menyoroti strategi pembangunan ekonomi neoklasik tersebut dari sisi cara mengatasi masalah tenaga kerja yang melimpah di tengah keterpurukan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang

¹ Wahyu Budi Nugroho, *Industrialisasi Orde Baru Tumbuh dengan Kemiskinan*, <http://kolomsosiologi.blogspot.com/2011/03/industrialisasi-orde-baru.html>, 12 Maret 2011.

padat penduduk ini bertumpu pada masalah banyaknya surplus tenaga kerja dengan kondisi upah yang memprihatinkan. Dengan industrialisasi besar-besaran, pembangunan diarahkan untuk menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja di sektor formal guna menyerap seluruh surplus tenaga kerja, dan membawa negara menuju sebuah kondisi di mana perekonomian tertata sedemikian rupa dan bergerak maju dalam proses pembangunan berkelanjutan.²

Konsep Fahim Khan juga dilatarbelakangi terjadinya akumulasi modal besar-besaran sebagai konsekuensi dari strategi industrialisasi tersebut. Penciptaan lapangan kerja lewat melalui industrialisasi ini memerlukan akumulasi modal melalui mobilisasi tabungan atau bahkan dengan pinjaman dari luar negeri. Kalangan pemodal diharapkan dapat berinvestasi sebesar-besarnya. Diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan keuntungan kelompok kapitalis ini dengan berbagai insentif fiskal dan moneter dengan tetap mempertahankan upah dalam tingkat minimal.³

Fahim Khan menyoroti strategi investasi berkelanjutan dari surplus kapitalis ke dunia industri yang diyakini membawa perekonomian ke sebuah fase di mana semua surplus tenaga kerja dapat terserap yang menjadikan kaum kapitalis tidak mungkin lagi untuk tetap mempertahankan upah pada tingkat upah minimal

² Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995, hlm. 98.

³ *Ibid.*, hlm. 197-198.

(subsisten). Tekanan-tekanan dari sisi penawaran tenaga kerja akan memaksa upah naik. Ini akan menjadi titik balik bagi perekonomian atau fase tinggal landas. Seterusnya ekonomi sudah tertata sedemikian rupa menuju pertumbuhan berkelanjutan yang meningkatkan ketersediaan lapangan kerja serta meningkatkan upah dalam perekonomian.⁴

Kegagalan strategi tersebut dalam analisis Fahim Khan karena lebih terfokus pada penyerapan tenaga kerja sektor formal yang mempersyaratkan investasi besar dari kalangan pemodal. Strategi ini kurang mendukung ketersediaan peluang kewirausahaan rakyat yang mandiri. Penilaian akan kegagalan tersebut memunculkan konsep Fahim Khan tentang strategi pembangunan ekonomi Islam. Penciptaan peluang kewirausahaan dijadikan Fahim Khan sebagai kata kunci dalam konsepnya yang mengkritisi strategi konvensional dan mendukung strategi pembangunan ekonomi Islam.

Paling tidak ada tiga konteks yang melatarbelakangi konsep Fahim Khan. Pertama konteks latar belakang kehidupan dan akademiknya. Kedua, tren pembangunan ekonomi kontemporer. Dan ketiga tren pengembangan ekonomi Islam. Setting latar belakang pendidikan Fahim Khan yang memiliki dasar keilmuan statistik di jenjang kesarjanaannya awalnya, yang kemudian dikembangkan dengan bidang ilmu ekonomi. Serta keterlibatannya dalam pembuatan berbagai model, ikut memberi warna konsepnya

⁴ Ibid.

yang amat memperhatikan model matematika. Model matematika terkesan mensimplifikasi masalah dalam persamaan dan angka.

Dalam merumuskan gagasan ekonomi Islamnya, Fahim Khan memakai metode pemikiran retrospektif, sebagaimana dipakai oleh kebanyakan pemikir ekonomi Islam kontemporer. Metode ini berangkat dari penelaahan terhadap problematika ekonomi di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan.⁵ Pendekatan yang dipakai oleh Fahim Khan ini karena ia berupaya mencari solusi dengan memakai aturan normatif ekonomi Islam yang ia interpretasikan dalam model ekonomi makro.

Menurut Fahim Khan teknik menyediakan peluang kewirausahaan ia sederhanakan dalam poin berikut:

1. Ketersediaan modal bagi rakyat yang akan memulai usaha, adanya sistem yang menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan wirausahawan.
2. Adanya sistem jaminan sosial yang dapat menopang kehidupan pelaku usaha sampai mereka berhasil dalam usaha mereka.⁶

⁵ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam (Telaa Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 12.

⁶ Ibid., hlm. 1999.

Dua hal tersebut jelas sandarannya dalam aturan ekonomi Islam. Yang pertama dengan prinsip mudlarabah. Yang kedua dengan filantropi Islam. Dalam Alquran disebutkan bahwa Allah menghapus riba dan menyuburkan shadaqah. Penghapusan riba ini dimaknai menjadi penghapusan bunga dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil ia pakai sebagai teknik pemberian modal berbasis bagi hasil. Sedangkan penyuburan sedekah menjadi pijakan untuk strategi jaminan sosial yang dapat mendorong orang berani melakukan aktivitas kewirausahaan. Dengan demikian Fahim Khan memiliki sandaran yang dipandang kuat untuk menformulasikan konsep strategi pembangunan ekonomi padat penduduk tersebut.

Fahim Khan dengan sandaran yang dipandang kuat ini mengandaikan kondisi ideal dengan prasyarat-prasyarat yang terkadang kurang memperhatikan realitas. Oleh karena itu metodenya lebih cenderung normatif ideologis. Pendekatan empiris ia pakai sekedar untuk memotret realitas yang penuh problem. Sementara pemecahan problemnya cenderung memakai norma yang idealis kurang mengurai akar penyebabnya secara empiris. Ini nampak dalam pernyataannya bahwa prasyarat-prasyarat tersebut belum terpenuhi dalam sistem ekonomi yang berporos pada sistem kapitalisme. Sistem berbasis bunga mendorong setiap orang akan lebih memilih mencari pekerjaan berupah tetap daripada risiko peluang bisnis. Sebaliknya, sistem Islam memiliki potensi untuk dapat memperluas peluang

kewirausahaan sehingga setiap individu memiliki pilihan apakah akan memilih pekerjaan berupah tertentu ataukah memanfaatkan peluang bisnis. Kata-kata berpotensi menunjukkan penegasan idealis yang belum teraktualisasikan.

Kerangka ekonomi berbasis bunga dinilai tidak menjamin terpenuhinya satu pun persyaratan-persyaratan tersebut, terutama di sebuah negara berkembang yang memiliki tenaga kerja berlimpah. Sebuah sistem berbasis bunga dinilai tidak menyediakan modal yang diperlukan untuk seorang wirausahawan potensial, walaupun menyediakan disertai begitu banyak yang akan dipertaruhkan wirausahawan tersebut sehingga ia akan lebih memilih mencari pekerjaan berupah tetap daripada risiko peluang bisnis. Dalam realitasnya apakah demikian ? Fahim Khan tidak memperkuat bukti empirisnya.

Sebaliknya, sistem Islam memiliki potensi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di atas dan memperluas peluang kewirausahaan sehingga individu yang bersangkutan memiliki pilihan apakah akan memilih pekerjaan berupah tetap ataukah memanfaatkan peluang bisnis. Pernyataan tersebut didasarkan pada pengandaian kondisi yang diidam-idamkan.

Untuk memperkuat koonsepsinya Fahim Khan memakai pendekatan matematis. Dengan model persamaan untuk memudahkan dan meyakinkan hubungan logis dari konsepnya. Ini dimaklumi mengingat fahim Khan banyak bergelut dengan statistika dan ekonometrika. Ia memimpin berbagai uji coba terkait

pengembangan model-model ekonometrika bagi perencanaan dan proyeksi ekonomi makro, juga memimpin riset terkait berbagai isu kebijakan ekonomi makro.⁷ Latar belakang ini menjadikan model konsepnya lebih bersifat proyektif dan ekonometris.

B. Analisis Implementasi Gagasan Fahim Khan dalam Diskursus Pembangunan Ekonomi Kontemporer

Dalam diskursus ekonomi pembangunan kontemporer, sebagaimana ditulis Wahyu Nugroho, muncul dua strategi pembangunan ekonomi. Yaitu strategi strukturalis dan strategi neoklasik. Strategi pembangunan model strukturalis menekankan perombakan masyarakat terkait sistem, kelembagaan, institusi-institusi sosial bahkan kehidupan demokrasi di dalamnya. Setelah peombakan-perombakan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai (semisal terminimalisirnya pihak-pihak yang dirugikan) barulah pembangunan ekonomi dijalankan. Sedangkan strategi neoklasik menitik beratkan pada pembangunan berpola industrialisasi secara besar-besaran dengan keyakinan akan adanya trickle down effect (efek rambatan) yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Strategi ini dibuktikan dengan suksesnya Program Marshall Plan dalam rekonstruksi negara-negara Eropa Pasca Perang Dunia II.⁸

⁷ Lihat: Biodata of Dr. Fahim Khan – IRTI Publication, http://www.irtipms.org/Fahim%20Khan_E.asp, diakses 10 September 2014.

⁸ Wahyu Budi Nugroho, *Industrialisasi Orde Baru Tumbuh dengan Kemiskinan*, <http://kolomsosiologi.blogspot.com/2011/03/industrialisasi-orde-baru.html>, 12 Maret 2011.

Gagasan Fahim Khan merupakan konsep ideal yang ditawarkan untuk mengatasi problem kelebihan tenaga kerja dalam rangka pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan penduduk. Fahim Khan hanya menyoroti strategi neoklasik yang digambarkannya hanya terfokus pada upaya memperluas kesempatan kerja agar secara cepat dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang berlimpah. Strategi tersebut dinilai Fahim Khan tidak berhasil memenuhi harapan mencapai titik balik atau tinggal landas sebagaimana direncanakan.⁹

Kegagalan strategi tersebut dalam penilaian Fahim Khan penyebabnya sederhana, yakni menyederhanakan strategi pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja hanya pada upaya pembangunan yang difokuskan pada percepatan penyerapan tenaga kerja dengan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan upah/gaji tetap.¹⁰ Dalam konsep Fahim Khan tujuan pembangunan nasional seharusnya untuk menghasilkan peluang-peluang yang pertama kali menyerap surplus sumber daya manusia menuju ke titik balik atau tinggal landas, setelah itu surplus sumber daya manusia yang tersisa menjadi terdorong untuk terserap ke dalam sistem.¹¹

Strategi penekanan kewirausahaan Fahim Khan tersebut tentu tidak terlepas dari tren perkembangan ekonomi makro atau ekonomi pembangunan kontemporer. Dalam kajian ekonomi

⁹ Fahim Khan, *Op.Cit.*, hlm. 98.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 202.

makro kontemporer ditekankan pentingnya posisi pengusaha dalam pembangunan ekonomi. Luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila tersedianya pengusaha dalam jumlah tertentu penduduk adalah lebih banyak, lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan.¹² Kewirausahaan menjadi faktor penting yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi.¹³

Pentingnya kewirausahaan terwacanakan secara luas dalam tren pembangunan ekonomi kontemporer. Fahim Khan bisa jadi larut dalam wacana ini. Memang secara realistis terbukti dengan adanya krisis moneter, sejumlah konglomerat pemilik perusahaan besar jatuh. Kondisi ini menggugah kesadaran bersama akan kekuatan industri kecil yang lebih dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi. Industri kecil lebih mudah menyesuaikan diri dengan fluktuasi perekonomian dibandingkan perusahaan besar. Pemberdayaan industri kecil menjadi solusi yang dipandang jitu dalam mengatasi problem pengangguran akibat surplus tenaga kerja.¹⁴

Fahim Khan menyimpulkan bahwa dalam kerangka kelembagaan dan kerangka etis ekonomi Islam, yang lebih

¹² Sadono Sukirno, *Makro konomi Teori Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 430.

¹³ Daniel Smith, *The Role of Entrepreneurship in Economic Growth, Undergraduate Economic Review, Vol. 6 [2010], Iss. 1, Art. 7*, Digital Commons @ IWU, 2010, h.1, <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=uer>, diakses 8 Agustus 2014.

¹⁴ Musa Asy'arie, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Yogyakarta : LESFI, 2001, hlm. 123.

dipromosikan adalah wirausaha daripada sewa tenaga kerja berupah tetap. Sistem ini menciptakan penawaran sekaligus permintaan wirausahawan dalam ekonomi. Semakin banyak wirausaha dipromosikan, semakin banyak upaya berbagi risiko produktif dan semakin banyak pula terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi.¹⁵ Dalam rangka menyemarakkan kewirausahaan, Fahim Khan menyebutkan prasyarat yang harus tersedia dalam strategi membuka peluang kewirausahaan bagi surplus sumber daya manusia sebagai berikut:

- a. Ketersediaan modal yang diperlukan oleh surplus tenaga kerja dalam memulai usaha mandiri.
- b. Adanya sistem yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha.
- c. Adanya sistem penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usahahingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta.¹⁶

Beberapa prasyarat tersebut jika disederhanakan meruncing pada dua aspek yaitu aspek kemudahan akses modal dan aspek jaminan sosial. Fahim Khan menumpukan pada dua hal ini yang dalam pandangannya penting dan krusial. Ini menunjukkan ada keterkaitan antara pemikirannya dengan semangat pengembangan ajaran substansi ekonomi Islam, institusi-institusinya maupun aplikasinya.

¹⁵ Fahim Khan, *Op.Cit.*, hlm. 204-205.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 199.

Faim Khan, sebagaimana para ahli ekonomi Islam lainnya menguatkan teori bahwa Islam dengan ajaran yang dibawanya dan institusi-institusi yang dimunculkannya, memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Monzer Kahf¹⁷ misalnya melihat bahwa ajaran Islam yang terkait dengan zakat, larangan riba serta pola kemitraan dalam musyarakah/mudlarabah, dapat menjadi strategi riil untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Bahkan Maya Shatzmiller dalam artikelnya *Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World* dengan menelaah peran instiusi-institusi Islam pada periode-periode pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa ada kejelasan indikator yang menunjukkan bahwa aturan ekonomi Islam dan institusi-institusinya mendukung dan sama sekali tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi. Artikel Maya membantah Greif dan Timur Kuran yang menganggap aturan dan institusi Islam tidak berhasil mematerialisasikan pertumbuhan ekonomi.¹⁸

Dukungan Fahim Khan terhadap ekonomi Islam lebih pada dukungan formalitas pmbelakuan fiqh muamalah dari pada prinsip atau nilai ekonomi Islam dengan aplikasi yang lebih efektif

¹⁷ Monzer Kahf, *The Islamic Economy : Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam (Telaah Analisis terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 75-95.

¹⁸ Maya Shatzmiller, *Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World*, *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 54 (2011) 132-184,

komprehensif. Penekana pada sisi formalitas ini nampak pada apa yang ia maksudkan dengan bagi hasil. Ia hanya mempromosikan bagi hasil atau kemitraan dengan format mudarabah atau musyarakah. Ia tidak mencoba mengimplementasikannya dengan lebih luas dan berimbang. Konsep Fahim Khan masih kental normatifnya. Ia membuat batasan hitam putih antara sewa dengan kemitraan. Fahim Khan kurang memperhatikan inovasi aplikasi nilai kemitraan secara fungsional. Ia masih berkatut pada normativitas syirkah dan mudlarabah. Padahal di Jepang yang bukan negara Islam saja berhasil mengartikulasikan prinsip kemitraan ini pada bidang hubungan antara pekerja dan perusahaan. Prinsip sewa telah diramu dengan prinsip kemitraan.

Strategi yang dilakukan Jepang utamanya melakukan Gerakan Produktivitas dengan menekankan keikutsertaan partisipasi pekerja dengan dukungan penuh dari pemerintah dan swasta. Gerakan produktivitas ini berbeda dengan gerakan rasionalisasi perusahaan yang dilakukan di Jepang sebelum perang dunia kedua. Gerakan produktivitas ini dimulai pada tahun 1954 pada waktu Jepang berusaha keras melaksanakan pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan ekspor melalui peningkatan produktivitas di sektor industri.¹⁹ Gerakan ini bertumpu pada

¹⁹ J. Ravianto, *Orientasi Produktivitas dan Ekonomi Jepang, Apa Yang Harus Dilakukan Indonesia ?*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 22-24.

peningkatan produktivitas dengan tiga prinsip pedoman gerakan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, peningkatan produktivitas akan meningkatkan perluasan lapangan kerja dalam jangka panjang. Selagi peningkatan produktivitas belum menampakkan hasil, pemerintah bersama rakyat perlu bekerja sama mengambil langkah sinergis yang diperlukan seperti memindahkan kelebihan pekerja ke area yang memerlukannya, untuk menghindari terjadinya pengangguran.
2. Ada kesepakatan bersama antara Tenaga kerja dengan manajemen dalam menyikapi berbagai kondisi yang ada pada perusahaan serta bekerja sama mendukung dan menyebarkan langkah-langkah tersebut.
3. Hasil dari peningkatan produktivitas perlu dibagikan secara adil di antara manajemen, pekerja serta pelanggan, dengan memperhatikan keadaan ekonomi secara nasional.²⁰

Tiga prinsip tersebut menunjukkan bagaimana kejasama atau bagi hasil diimplementasikan di antara pekerja dan yang mempekerjakan. Berbeda dengan ilmu ekonomi klasik yang memandang tenaga kerja manusia sebagai bagian dari unsur pokok produksi di samping modal dan tanah, konsep produktivitas Jepang menekankan bahwa manusia secara alamiah membuat barang dan jasa yang diperlukan untuk hidup. Sedangkan tanah, modal dan teknologi adalah alat untuk produksi.

²⁰ Ibid., hlm. 25-26.

Manusia harus memainkan peranan utama dalam memanfaatkan nilai guna dari ketiga unsur tersebut. Perusahaan perlu memperhatikan dimensi sosial kerjasama kerja sama antar tenaga kerja. Tenaga kerja harus dipandang sebagai prioritas di atas modal, tanah dan teknologi. Di sini, tenaga kerja merupakan bentuk keunikan tingkah laku dari jenis manusia dan meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki kondisi kerja merupakan landasan bagi pengisian hidup secara baik serta memberikan “arti” bagi kehidupan manusia.²¹

Ketika melihat posisi tenaga kerja kurang mendukung, bukan membangun posisi tenaga kerja, tetapi Fahim Khan berupaya meminimalisir dan lebih mengerahkan ke pengusaha. Berbeda dengan Jepang sebagaimana geakan produktivitas tersebut. Jepang juga mengkritisi sistem ketenagakerjaan konvensional. Pengkritisan ini dirunut sampai pada yang mendasar yaitu pemakaian istilah. Pemakaian kata kata labor memberikan konotasi fisik dan dapat menyinggung perasaan tenaga kerja. Kata *labor* atau tenaga kerja dalam platform produktivitas Jepang dipakai secara luas mencakup tenaga kerja intelektual maupun fisik serta mencakup setiap aspek kehidupan kerja. Individu-individu pekerja di sini dipandang sebagai satu kesatuan sosial.²²

²¹ Ibid., hlm. 32.

²² Ibid., hlm. 33.

Jika dikaitkan dengan prinsip muamalah, maka pola kemitraan di Jepang adalah Islami secara substansial. Persoalan muamalah aplikasinya luas dan inovatif, tidak sekaku ibadah. Yang terpenting prinsip atau tujuan muamalah terwujud dalam bentuk inovasi apapun. Tujuan ini secara prinsipil sebagaimana ditulis Riyadl Manshur Al-Khalify ada lima yaitu: Pertama, prinsip keadilan (*al-'adalah*), lawan dari kezaliman (*al-zhulm*). Kedua, prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*), lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta (*al-kidzb wa al-kitman*). Ketiga, prinsip perputaran harta (*al-tadawul*) lawan dari penumpukan harta (*al-kanz*). Keempat, Prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-I'tilaf wa al-ta'awun*), lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bertolak belakang (*al-furqah wa al-ikhtilaf wa al-tadabur*). Kelima, prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf' al-haraj*).²³

Strategi pembangunan dengan gerakan produktivitas model Jepang memiliki persamaan dengan prinsip maqashid al-syari'ah fi al-iqtishad, utamanya prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-I'tilaf wa al-ta'awun*). Artinya dengan menerapkan semangat kebersamaan dan semangat berbagi yang diterapkan pada hubungan antara pengusaha dan karengusaha dan karyawan membuahakan semangat kerjasama

²³ Riyadl Manshur Al-Khalify, *Al-Maqashid Al-Syar'iyyah wa Atsaruha Fi Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah*, Majallah Jami'ah Al-Malik 'Abd al-'Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami, 2004, hlm. 28.

yang berimbang pada kenaikan produktivitas yang dinikmati bersama.

Strategi yang demikian masih luput dari gagasan Fahim Khan. Fahim Khan menyederhanakan strategi pembangunan ekonomi hanya pada persoalan membuka peluang kewirausahaan bagi surplus sumber daya manusia, yang mempersyaratkan ketersediaan modal untuk memulai usaha mandiri dalam sistem *profit and loss sharing* yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha, serta adanya sistem penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usaha hingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta.²⁴ Apa yang disebutkan Fahim Khan ini adalah diberlakukannya musyarakah dan mudharabah sebagai pengganti sistem bunga. Padahal pemberlakuan mudharabah membutuhkan kondisi masyarakat yang kondusif agar mudharabah memberi masalah. Bahkan khazanah fiqh klasik telah memperingatkan hal ini. Dalam *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan mudharabah dipersyaratkan empat hal yakni sifat amanah, keahlian/skill usaha yang baik, kejujuran dan keikhlasan. Keempat unsur ini yang dapat menjamin diberlakukannya mudharabah yang membawa hasil. Jika tidak ada keempat unsur ini maka aplikasi mudharabah dapat menimbulkan pemubaziran harta. Bahkan ditegaskan bahwa mudharabah

²⁴ Ibid., h. 199.

dilarang ketika pihak yang terlibat tidak amanah, tidak efisien dan tidak memiliki keahlian mengelola dana.²⁵

Strategi Fahim Khan belum sampai kepada kendala yang dihadapi yang secara empiris terjadi ketika digalakkan usaha berbasis bagi hasil. Tidak sedikit orang yang tertarik dan terdorong melakukan usaha tetapi tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan bukan karena tidak ada peluang tetapi karena ada faktor lain yang lebih mendasar. Salah satunya diungkap oleh Musa Asy'arie. Dalam pembinaan pembinaan industri kecil dan menengah, banyak menghadapi masalah terkait keterbatasan dalam akses pasar, sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan dalam organisasi dan manajemen, serta pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara pelaku ekonomi yang ada. Di atas itu semua Musa Asy'ari mengungkap adanya persoalan mendasar yang mengurung pelaku usaha sehingga sulit untuk keluar dari banyak masalah tersebut. Meski banyak bantuan tersedia dan ada niat yang besar dari dalam diri mereka namun terasa berat untuk melangkah maju. Persoalan mendasar yang mengurung ini lebih bersifat kultural, yaitu sistem nilai budaya yang telah membentuk kepribadian pelaku usaha yang sudah berjalan puluhan tahun. Sistem nilai budaya ini mempengaruhi cara pelaku usaha tersebut menjalankan usaha (manajemen), seperti cara dalam bekerja,

²⁵ 'Abd al-Rahman Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990, hlm. 36.

menghadapi mitra bisnisnya, menangani karyawan, mengelola uang, menggunakan keuntungan, menghadapi pesaing dan bertahan menghadapi perubahan dan menghadapi krisis.²⁶

Diperlukan Strategi pendekatan yang yang fundamental, terpadu dan berkelanjutan untuk membina dan memberdayakan para pelaku usaha kecil antara lain pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang perlunya memahami setting budaya di mana industri itu tumbuh berkembang. Sebagai contoh lingkungan pedesaan berpengaruh membentuk pola budaya agraris, sementara tantangan yang dibawa oleh dunia industri mengharuskan adanya basis budaya industri yang inovatif, tepat waktu, akurat dan konsisten pada mutu yang terjaga secara konstan, responsif terhadap tuntutan persaingan, terbuka terhadap perubahan dan persaingan yang makin ketat. Perbedaan budaya ini terlihat dalam cara memandang uang, waktu dan teknik. Dalam budaya agraris waktu dipandang sebagai gerak siklus sedangkan dalam budaya industrial dipandang sebagai gerak linier. Dalam budaya agraris uang lebih bermakna sosial sementara dalam budaya industrial lebih bermakna ekonomi. Teknologi dalam budaya agraris dipandang sebagai prestise sehingga tidak optimal pemanfaatannya sementara budaya industri menuntut pemanfaatan teknologi yang canggih, optimal dan rasional.²⁷

²⁶ Musa Asy'arie, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Yogyakarta : LESFI, 2001, hlm. 124.

²⁷ Ibid., hlm. 124-132.

Fahim tidak banyak menjelaskan pra-kondisi masyarakat untuk diberlakukannya sistem bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam persyaratan mudharabah. Padahal penyiapan kondisi masyarakat baik secara skill maupun moral yang kondusif untuk usaha produktif ini sangat penting. Beberapa negara Islam sangat memperhatikan strategi ini. Saudi Arabia misalnya, berkembang cukup dramatis. Di tahun 1960 an kebanyakan penduduknya adalah nomaden atau semi nomaden. Arab Saudi melakukan strategi pembangunan dengan proyek utama mentransformasikan penghasilan minyak untuk membentuk Negara industry modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam. terjadi import tenaga kerja besar-besaran. Persoalan yang dihadapi adalah mendidik tenaga kerja domestic berkeahlian. Minyak adalah sumberdaya manusia yang tidak dapat diperbaharui.²⁸

Tidak disebutkannya strategi pembangunan sumber daya manusia yang kondusif barangkali karena titik bidik Fahim Khan lebih pada upaya mempromosikan sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional berbasis bunga. Ini menyebabkan gagasan Fahim Khan tersebut terkesan kurang komprehensif bila dikaitkan dengan wacana kontemporer pembangunan ekonomi.

C. Konsep Fahim Khan dan Pengembangan Ekonomi Islam di Bidang Perbankan

²⁸ Todaro, Michael P. *Economic Development*, Edisi VI, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1997, hlm. 664-665.

Kesemarakan pemikiran ekonomi Islam modern terpicu oleh tumbuh kembangnya perbankan Islam yang merupakan realisasi dari gagasan untuk membentuk kembali perekonomian berdasarkan Islam. Gagasan ini terkait dengan semangat kebangkitan kembali Islam di mana keuangan, perbankan dan investasi menjadi garapan terpenting dalam proses Islamisasi ekonomi. Perbankan modern berbasis bunga ditolak dan dianggap tidak Islami karena adanya larangan Al-Qur'an terhadap riba yang dimaknai sebagai larangan terhadap bunga.²⁹ Sistem kerja sama berdasarkan prinsip bagi hasil dipakai sebagai alternatif dasar bagi dunia perbankan dan investasi dalam perspektif Islam.³⁰

Dalam semangat penyemarakan bank syariah tersebut pemikiran Fahim Khan hadir. Gagasannya mempromosikan keunggulan sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil atas system ekonomi konvensional berbasis bunga dalam memacu pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja. Konsep Fahim Khan tentang formulasi Islam tentang strategi pembangunan ekonomi di negara-negara yang mengalami surplus tenaga kerja tersebut mengasumsikan kondisi-kondisi ideal sebagaimana yang ia gambarkan dari aturan-aturan normatif ekonomi Islam. Poros dari aturan normatif yang ia jadikan prinsip dasar adalah prinsip bagi

²⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, terj. Asep Hikmat Suhendi dari judul asli "Bank Islam", Bandung : Penerbit Pustaka, 1984, hlm. xiii.

³⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, Op.Cit., hlm. xiii.

hasil dan prinsip anti riba (bunga) sebagai fondasi bangunan ekonomi Islam.

Fahim Khan mengkritik sistem ekonomi berbasis bunga yang menekankan solusi penanganan problem ekonomi surplus tenaga kerja melalui strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. Strategi konvensional ini hanya berupaya dengan berbagai cara untuk menciptakan kesempatan kerja berupah tetap bagi tenaga kerja secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Strategi ini membutuhkan para kapitalis untuk berinvestasi memperluas lapangan pekerjaan. Para kapitalis ini cenderung memakai surplus sumber daya manusia untuk dipekerjakan bukan untuk dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan. Strategi konvensional ini cenderung mengabaikan strategi penciptaan peluang kewirausahaan sebagai solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja.³¹

Sebaliknya Fahim Khan mendukung sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil yang menekankan solusi penanganan problem ekonomi surplus tenaga kerja melalui strategi menciptakan peluang kewirausahaan. Strategi membuka peluang kewirausahaan bagi surplus sumber daya manusia memerlukan tiga prasyarat sebagai berikut: Pertama, ketersediaan modal yang diperlukan oleh surplus tenaga kerja dalam memulai usaha mandiri. Kedua, Adanya sistem yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha. Ketiga, adanya sistem

³¹ Fahim Khan, *Op.Cit.*, hlm. 198.

penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usaha hingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta.³² Prasyarat pertama dan kedua dipenuhi oleh institusi tamwil Islam atau perbankan syariah. Sedangkan prasyarat ketiga dipenuhi oleh institusi baitul mal Islam atau lembaga zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.

Sistem ekonomi non-Islam yang dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga dinilai tidak berhasil mewujudkan prasyarat-prasyarat bagi strategi membuka peluang kewirausahaan tersebut terutama di negara-negara berkembang yang berpenduduk padat. Sistem berbasis bunga dipandang tidak menyediakan modal yang dibutuhkan oleh calon wirausahawan potensial yang akan memulai usaha. Perbankan konvensional berbasis bunga lebih tertarik untuk membiayai usaha mapan yang dapat memastikan terhindar dari kredit macet dan berbagai resiko pembiayaan. Pengajuan pembiayaan oleh orang baru akan memulai usaha biasanya menuntut dipenuhinya persyaratan yang sulit termasuk jaminan yang kadang tidak dapat dipenuhi oleh calon pelaku usaha. Dalam kondisi ini tentu ia akan lebih memilih untuk mencari kerja berupah tetap dari pada melakukan usaha mandiri yang sulit dan beresiko.³³

Fahim Khan meyakini bahwa institusi ekonomi Islam dengan perbankan syariahnya memiliki pengaruh kuat untuk

³² Ibid., hlm. 199.

³³ Ibid.

menciptakan dan mendorong kegiatan kewirausahaan dalam perekonomian. Keharaman riba merupakan pengaturan institusional yang memaksa salah satu sumber daya yang langka dalam perekonomian (yakni modal finansial) untuk aktivitas kewirausahaan dari pada disewakan untuk memperoleh sewa modal. Fahim Khan menegaskan bahwa modal keuangan dilarang keras untuk memperoleh sewa, yaitu bunga. Satu-satunya cara agar modal keuangan dapat menghasilkan pendapatan adalah dengan melibatkannya dalam aktivitas kewirausahaan di mana keuntungan yang akan diperoleh merupakan imbalan resiko kerugian produktif. Membiarkan modal finansial menganggur juga tidak disukai. Ada beban pungutan zakat atas sumber daya jika tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan produktif.³⁴ Modal finansial tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa melibatkan sumber komplementer. Sumber daya komplementer yang terbaik adalah sumber daya manusia, terutama ketika sumber daya manusia ini sangat banyak sehingga modal finansial dapat menegosiasikan rasio bagi-hasil yang lebih baik. Dengan demikian, pengaturan institusional Islam seperti perbankan syariah ini tidak hanya memaksa sumber daya finansial untuk menjadi sumber daya wirausaha, tetapi juga menciptakan permintaan sumber daya manusia.³⁵

³⁴ Ibid., hlm. 203.

³⁵ Ibid.

Sistem ekonomi konvensional dengan sistem perbankan berbasis bunga dinilai Fahim Khan tidak mendorong penyemaran wira usaha. Dalam sistem ini, yang dipertaruhkan dalam sebuah aktivitas kewirausahaan jauh lebih berat dari pada pekerjaan berupah tetap. Risiko berwirausaha dalam ekonomi berbasis bunga meliputi seluruh upaya manusia diinvestasikan, seluruh modal keuangan yang diinvestasikan, serta bunga yang harus dibayarkan atas modal keuangan. Seorang wirausahawan yang melakukan usaha bukan dengan modal sendiri ketika mengalami kerugian menanggung beban yang amat berat. Dia harus mengembalikan modal pinjaman dengan seluruh bunganya. Dia juga menghadapi bahaya kelaparan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Melihat beratnya risiko tersebut, pekerjaan yang berupah tetap yang menjamin paling tidak kebutuhan dasar kehidupan (subsistensi) akan selalu lebih disukai.³⁶

Sistem perbankan konvensional menawarkan modal finansial untuk mereka yang sudah memiliki modal. Lebih banyak modal yang dimiliki seseorang, semakin banyak pinjaman modal yang dapat diperolehnya dari bank. Sistem perbankan justru kontraproduktif terhadap upaya mendukung kelebihan pasokan sumber daya manusia untuk mencari kegiatan usaha mandiri produktif. Mereka yang memiliki sumber daya keuangan lebih memilih untuk menabungnya di bank untuk mendapatkan sewa

³⁶ Ibid., hlm. 204.

uang yang tetap daripada menggunakan sumber daya finansial tersebut dalam kegiatan kewirausahaan mereka sendiri atau untuk dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan orang lain, kecuali jika mereka yakin akan keuntungan yang lebih tinggi dari suku bunga.³⁷

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam dengan institusi philanthropisnya yang menjamin kebutuhan hidup minimal dan sistem perbankan syariahnya yang tidak memakai bunga. Dalam sistem ini, individu yang berwirausaha menghadapi risiko yang jauh lebih sedikit. Risiko akan dibagi antara pelaku wira usaha dan pemilik modal finansial. Risiko finansial bahkan ditanggung sepenuhnya oleh para pemilik modal finansial. Ketika terjadi kerugian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal. Pelaku usaha sudah mempertaruhkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Ketika terjadi kebangkrutan usaha, tidak ada ketakutan kelaparan karena masyarakat menjamin kebutuhan pokoknya. Dalam suasana yang demikian, sumber daya manusia akan lebih tertarik mencari kegiatan kewirausahaan dari pada pekerjaan dengan upah tetap. Mereka akan memiliki pekerjaan tetap sebatas sampai mereka dapat menemukan modal finansial yang diperlukan untuk memulai kegiatan kewirausahaan.³⁸

Namun demikian, idealitas perbankan syariah berbasis bagi hasil tersebut berhadapan dengan realitas operasional perbankan

³⁷ Ibid., h. 207.

³⁸ Ibid.

syariah terutama dari sisi pembiayaan. Dalam konsep fiqh yang digunakan dalam merumuskan operasionalisasi perbankan Syari'ah ada dua kategori prinsip/metode pembiayaan yakni model penyertaan modal dengan prinsip bagi hasil (prinsip *mudlarabah/musyarakah*) dan prinsip *mark-up & fee* (pengambilan keuntungan dan upah).³⁹ Sebagai lembaga bisnis, untuk tetap eksis bank syari'ah dituntut dapat menghasilkan keuntungan dengan tetap berlabelkan Islam/berpijak pada aturan-aturan hukum Islam. sudah barang tentu dalam pembiayaan bank syariah lebih memilih memakai akad murabahah atau ijarah dengan prinsip *mark-up & fee* (pengambilan keuntungan dan upah) dari pada memakai akad mudlarabah atau musyarakah yang berbasis prinsip bagi hasil yang tidak memberi kepastian keuntungan di muka.

Terhadap banyaknya pilihan akad dalam perbankan syariah yang memudahkan bank memakai prinsip yang bukan berbasis bagi hasil ini, Fahim Khan justru apresiatif dan tidak memberikan kritikan. Ia malah terkesan mendukung dengan pernyataannya:

“It, however, does not mean that the other financing techniques are less important and need to be discarded. They have their own uses and applications both at micro and macro levels. They not

³⁹ Pada prinsipnya ada lima jenis akad yang mendasari sistem pengembangan produk di bank Syari'ah yaitu : Prinsip *Wadi'ah* (simpanan), Prinsip *Syirkah* (kerja sama bagi hasil), Prinsip *Tijarah* (jual beli / pengembalian keuntungan), Prinsip *Al-Ajr* (pengambilan fee) dan Prinsip *Al-Qardl* (biaya administrasi). Lihat: Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Iskam*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 5-6.

only complement the profit-loss sharing methods but also provide flexibility of choice to meet the specific needs of different sectors and different economic agents in the society.”⁴⁰

(Ini, bagaimanapun, tidak berarti bahwa teknik pembiayaan lainnya kurang penting dan perlu dibuang. Masing-masing memiliki kegunaan dan aplikasinya sendiri baik di tingkat mikro dan makro. Teknik-teknik pembiayaan yang lain tersebut tidak hanya melengkapi metode bagi hasil (profit-loss sharing), tetapi juga menyediakan fleksibilitas pilihan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari berbagai sektor dan pelaku ekonomi yang berbeda di masyarakat).

Pernyataan Fahim Khan tersebut terkesan tidak konsisten dengan formulasi konsepnya yang berpijak pada sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil. Padahal dalam konsepnya, Fahim Khan menegaskan bahwa proses pembangunan dalam ekonomi Islam pertama-tama dengan mengganti sistem bunga dengan sistem bagi untung/rugi. Maka dibolehkannya pembiayaan memamakai prinsip jual beli/murabahah atau sewa (ijarah) yang memastikan mark-up yang jelas dan pasti dari pihak pelaku usaha yang dibiayai tanpa tergantung kondisi untung rugi usahanya, berarti upaya penyemarakan aktivitas kewirausahaan menjadi tidak maksimal dan masih mirip yang terjadi pada pembiayaan berbasis bunga yang banyak dikritik Fahim Khan.

Agaknya Fahim Khan tetap seorang tekstualis formalis hukum Islam daripada substansialis. Pemikirannya berangkat dari tekstualitas hukum Islam bahwa bunga haram, jual beli boleh. Ia

⁴⁰ Fahim Khan, Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques, <http://www.irti.org/>, diakses 14 Februari 2014.

tetap tidak berani menolak pola pembiayaan yang tidak berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Ia selaras dengan pengembangan perbankan syariah yang kental warna formalitasnya. sambil berupaya menyelami reasoning ekonominya. Jika belum sesuai maka dicari strategi lain. Jadi strateginya menyesuaikan strategi pengembangan bank syariah. Menggunakan akad-akad lain sehingga prinsip bagi hasil tidak maksimal dipakai ditolerir karena kondisi belum memungkinkan pemakaian akad berbasis bagi hasil seluruhnya.

Fahim Khan menyatakan bahwa dalam kondisi perekonomian di mana sumber daya manusia sangat melimpah, dan sumber daya lainnya (modal fisik atau finansial) sangat kurang, maka sumber daya yang langka jelas akan memperoleh harga sewa yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, ketika modal uang secara ketat dilarang untuk mendapatkan bunga, akan lebih menguntungkan untuk mengkonversi modal keuangan ini menjadi modal fisik yang dapat disewakan dari pada mencari keuntungan dengan bergabung dalam kegiatan kewirausahaan.⁴¹ Atau dengan kata lain dalam kondisi seperti ini wajar jika pembiayaan bank lebih memilih memakai bentuk akad sewa atau jual beli (murabahah) dari pada mudlarabah (bagi hasil).

Menurutnya dibutuhkan waktu sangat lama untuk mencapai kondisi di mana nilai sewa modal menurun ke tingkat di mana menjadi lebih menguntungkan untuk bergabung dengan kegiatan

⁴¹ Ibid., hlm. 207-208.

kewirausahaan sumber daya manusia dari pada menyewakan modal finansial atau fisik. Oleh karena itu Fahim Khan menyarankan adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga sewa modal fisik tidak mengalami kenaikan melampaui tingkat yang ditentukan oleh profitabilitas modal dalam kegiatan kewirausahaan.

Perbankan Syariah sebagai institusi keuangan Islam menuntut ditumbuhkembangkan dengan diversifikasi produk yang tidak hanya terpaku pada musyarakah dan mudharabah. Fahim Khan mentolerirnya bukan berarti inkonsisten dengan gagasannya yang mengidealkan prinsip bagi hasil sebagai satu-satunya basis sistem ekonomi Islam. Tetapi Fahim Khan mengikuti gradualitas proses pemakaian sistem berbasis bagi hasil yang menyemarakkan kewirausahaan menuju kemakmuran. Proses ini membutuhkan pengkondisian yang menyangkut kebijakan negara dan pembinaan sumber daya baik skill maupun moral.⁴² Pemodal dan pelaku usaha dengan didukung sistem yang tepat akan mempercepat proses penyemarakkan wira usaha yang dipandang sebagai strategi Islami pembangunan ekonomi padat penduduk.

Formulasi konsep Islam untuk pembangunan ekonomi padat penduduk perpektif Fahim Khan memang menekankan strategi pembangunan ekonomi pada pengaturan institusional untuk secara langsung melibatkan orang dalam kegiatan kewirausahaan daripada strategi memanjakan kapitalis untuk menciptakan

⁴²⁴² Ibid., hlm. 208.

kesempatan kerja dengan upah pasti di pasar kerja. Tetapi Fahim Khan menyadari bahwa meskipun ia meyakini bahwa meskipun mekanisme tersebut sudah *built-in* dalam ajaran ekonomi Islam, harus diciptakan kondisi yang mendukung dan memperkuat mekanisme tersebut melalui langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat pendidikan skill usaha dan moralitas Islami sekaligus. Kemampuan kewirausahaan adalah modal sumber daya manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan yang tepat. Perencanaan pendidikan yang tepat dapat berkontribusi banyak untuk mengurangi risiko wirausaha dengan terciptanya iklim sosial yang kondusif serta kesadaran bersama untuk mentaati segala aturan main. Tidak hanya pendidikan komersial, pendidikan Islam memiliki peranan penting yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan iklim sosial yang mendukung bisnis konstruktif serta menanamkan etika dan moral masyarakat.
2. Reformasi untuk efisiensi sistem perbankan. Perluasan akomodasi finansial melalui sistem perbankan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi sumber daya manusia enterprener. Efisiensi sistem perbankan dalam menyediakan pembiayaan tersebut dalam kerangka Islam mempersyaratkan reformasi substansial tidak hanya dalam struktur perbankan yang ada, tetapi pada seluruh sektor fiskal dan moneter. Dalam kerangka Islam, bank dan lembaga keuangan seharusnya diminta untuk menawarkan akomodasi

keuangan hanya untuk pengusaha. Pinjaman konsumtif dari perbankan komersial hampir tidak ada karena pinjaman ini harus berupa qardl hasan (pinjaman tanpa bunga atau tanpa bagi hasil).

3. Memperkuat sistem pengawasan yang efektif. Institusi Islam hisbah harus dihidupkan kembali untuk mengawasi secara efektif norma-norma keadilan sosial ekonomi dalam perekonomian. Harga, sewa, alat-alat produksi, struktur produksi, struktur upah, pasar dan fungsinya, dan sebagainya, semua masuk dalam lingkup pengawasan lembaga ini.⁴³

Dapat digarisbawahi bahwa konsep Islami pembangunan ekonomi padat penduduk dalam pemikiran Fahim Khan merupakan sinergi antara normativitas ajaran Islam dengan institusi yang dibangunnya. Konsep ini memadukan antara aturan larangan riba dan perintah shodaqah. Larangan riba memerlukan institusionalisasi atau pelembagaan keuangan dan perbankan berbasis kemitraan berbagi untung dan rugi. Sedangkan perintah shadaqah memerlukan institusionalisasi philanthropi Islam dalam sistem operasionalisasi zakat, infaq dan shadaqah yang efektif sebagai sistem jaminan sosial yang akan membentengi kekhawatiran kegagalan usaha. Keberhasilan institusionalisasi larangan riba dan perintah shadaqah ini akan mendorong proses pembangunan dengan berbasis penyemarakkan industri kecil dan

⁴³ Ibid.

menengah atau kewirausahaan dengan didukung proses pendidikan yang efektif dan sistem pengawasan yang efektif pula.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Formulasi konsep Islam tentang strategi pembangunan ekonomi padat penduduk menurut Fahim Khan bertumpu pada strategi perluasan aktivitas wira usaha produktif bukan bertumpu pada strategi perluasan lapangan kerja sektor formal dalam mengatasi surplus tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. Strategi membuka dan menyemarakkan usaha mandiri produktif ini yang dipandang sesuai dengan sistem ekonomi Islam berbasis kemitraan berbagi untung dan rugi (*profit-loss sharing*). Strategi ini berbeda dengan strategi ekonomi konvensional berbasis bunga yang menekankan akumulasi modal untuk pengembangan industri guna menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tetapi konsep Fahim Khan masih lebih kental dengan formalisme aturan hukum Islam dari pada memperluasnya secara substansial. Konsep kemitraan dan bagi hasil masih dimaknai sempit pada aspek pembiayaan lembaga keuangan dalam menyemarakkan dunia usaha. Implementasinya tidak diperluas pada hubungan industrial pada sektor formal. Fahim Khan masih mendikhotomikan antara strategi menciptakan lapangan kerja di sektor formal dengan strategi memperluas kewirausahaan. Akibatnya implementasi substansi ajaran kemitraan berprinsip bagi hasil tidak terimplementasikan secara komprehensif untuk secara maksimal mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

Gagasan Fahim Khan dilatarbelakangi oleh pengamatannya terhadap kegagalan strategi pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang mengadopsi teori-teori pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh ahli ekonom Barat. Kegagalan strategi tersebut dalam analisis Fahim Khan karena lebih terfokus pada penyerapan tenaga kerja sektor formal yang mempersyaratkan investasi besar dari kalangan pemodal. Penciptaan peluang kewirausahaan dijadikan Fahim Khan sebagai kata kunci dalam konsepnya yang mengkritisi strategi konvensional dan mendukung strategi pembangunan ekonomi Islam. Gagasan Fahim Khan ini tidak terlepas dari konteks latar belakang akademik dan kiprahnya memperkenalkan sistem keuangan Islam. Dalam merumuskan gagasannya, Fahim Khan memakai metode pemikiran retrospektif, sebagaimana dipakai oleh kebanyakan pemikir ekonomi Islam kontemporer. Metode ini menelaah persoalan-persoalan ekonomi kontemporer dengan merujuk pada norma ajaran Islam untuk mencari dukungan pemecahan problem tersebut. Fahim Khan merumuskan konsepnya dengan memotret fenomena ekonomi kontemporer aturan normatif ekonomi Islam yang ia interpretasikan dalam model ekonomi makro.

Pemikiran Fahim Khan tidak terlepas dari semangat penyemarak bank syariah. Gagasannya mempromosikan keunggulan sistem perbankan berbasis bagi hasil atas sistem perbankan konvensional berbasis bunga dalam memacu

pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja. Meskipun Fahim Khan meyakini bahwa sistem bagi hasil lah yang memiliki pengaruh kuat untuk menciptakan dan mendorong kegiatan kewirausahaan dalam perekonomian, ia tetap mendukung tumbuh kembangnya perbankan syariah dengan diversifikasi produk yang tidak hanya terpaku pada prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) tetapi ada prinsip jual beli (murabahah) dan prinsip sewa (ijarah) yang juga ditolerir. Fahim Khan mentolerirnya bukan berarti inkonsisten dengan gagasannya yang mengidealkan sistem bagi hasil sebagai basis sistem ekonomi Islam. Tetapi Fahim Khan mengikuti gradualitas dimana proses menuju idealitas sistem bagi hasil yang menyemarakkan kewirausahaan membutuhkan penciptaan kondisi yang kondusif. Upaya pendidikan dan penguatan skill usaha, reformasi dan efisiensi perbankan syariah, penguatan sistem pengawasan adalah proses atau bagian yang tidak terlepas dari strategi pembangunan ekonomi padat penduduk dalam bingkai sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil yang menyemarakkan kewirausahaan.

B. Saran-saran

Pemikiran Fahim Khan tentang strategi pembangunan ekonomi di negara padat penduduk dalam perspektif ekonomi Islam ini perlu dikembangkan aplikasinya dengan strategi kontemporer yang paling efektif merealisasikan substansi nilai ekonomi Islam (maqashid al-syari'ah fi al-iqtishad). Inovasi

strategi ini merupakan keharusan dari tuntutan muamalah Islami yang fleksibel, akomodatif dan efektif.

Strategi pembangunan ekonomi neoklasik yang dikritik oleh kalangan strukturalis pada dasarnya masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Demikian juga strategi Fahim Khan yang dipandang Islami tidak luput dari kelebihan dan kekurangan ketika diaplikasikan. Karena itu pengkajian dan penelahan dan evaluasi strategi pembangunan ekonomi memerlukan upaya intensif berkelanjutan mengiringi pembangunan ekonomi yang terus menerus menuju kemaslahatan (*falah*) kehidupan bangsa.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT mengiringi terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini. Kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan laporan penelitian yang disusun dengan segala keterbatasan penulis ini. Dengan segala kekurangannya penulis berharap laporan penelitian ini bermanfaat terutama dalam upaya menyemarakkan kajian ekonomi pembangunan perspektif ekonomi Islam dan memicu kajian-kajian lebih lanjut

DAFTAR PUSTAKA

- “Authors’ Biography”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-6, Number-2.
- Al-Jazairi, ‘Abd al-Rahman, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Khalify, Riyadl Manshur, *Al-Maqashid Al-Syar’iyyah wa Atsaruha Fi Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyyah*, Majallah Jami’ah Al-Malik ‘Abd al-‘Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami, 2004.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Armuji, Oji, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Islam (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)*, UIN Yogyakarta, 2010.
- Asy’arie, Musa, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Yogyakarta : LESFI, 2001.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Biodata of Dr. Fahim Khan – IRTI Publication, http://www.irtipms.org/Fahim%20Khan_E.asp, diakses 10 September 2014.
- BR, Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Bronfenbrenner, Martin, et.al., *Economics*, Edisi II. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.
- Colander, David C., *Economics*, Edisi V, New York: McGraw-Hill/Irwin. 2004.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994.

- Djunaidi, Ahmad & Thobieb Al-Azhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006.
- Dornbusch, Rudiger, et.al., *Macroeconomics*, Edisi VIII. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
- El-Ghazali, Abdel Hamid, *Man is The Basis of The Islamic Strategy For Economic Development*, Jeddah: IRTI-IDB, 1994.
- Hall, Robert E. dan John B. Taylor, *Macroeconomics Theory, Performance, and Policy*, Edisi II. New York: W. W. Norton & Company, 1988.
- Haq, Mahbub u, *Reflections on Human Development : How The Focus of Development Economics Shifted from National Income Accounting to People Centred Policies, Told by One of The Chief Architects of The New Paradigm*, New York: Oxford Univ. Press, 1995.
- Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Khan, Fahim, *Comparative Economics of Some Islamic Financing Tehniques*, <http://www.irti.org/>, diakses 14 Pebruari 2014.
- Khan, Fahim, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, second edition, New York : Routledge, 2001.
- Mahyudi, Akhmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- McConnell, Campbell R., et.al., *Contemporary Labor Economics*, Edisi VII. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006.

- Meier, Gerald M., *Leading Issues in Economic Development*, Edisi V, New York : Oxford University Press, 1989..
- Mountjoy, Alan B., *Industrialization and Developing Countries*, London: Hutchinson, 1975
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nugroho, Wahyu Budi, *Industrialisasi Orde Baru Tumbuh dengan Kemiskinan*, <http://kolomsosiologi.blogspot.com/2011/03/industrialisasi-orde-baru.html>, 12 Maret 2011.
- Perkins, Dwight H., Steven Radelet dan David L. Lindauer, *Economics of Development*, Edisi VI, New York : W.W. Norton & Company, Inc., 2006.
- Qahf, Muhammad Mundhir, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Plainfield, Ind.: Muslim Students Association of U.S. and Canada, 1978.
- Ravianto, J., *Orientasi Produktivitas dan Ekonomi Jepang, Apa Yang Harus Dilakukan Indonesia ?*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, Edisi ke-18. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005. Schiller, Bradley R., *The Economy Today*, ninth edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2003.
- Shatzmiller, Maya, "Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 54 (2011) 132-184.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Issues in Islamic Banking*, terj. Asep Hikmat Suhendi dari judul asli "Bank Islam", Bandung : Penerbit Pustaka, 1984.
- Smith, Daniel, "The Role of Entrepreneurship in Economic Growth", *Undergraduate Economic Review*, Vol. 6 [2010], Iss. 1, Art. 7, Digital Commons @ IWU, 2010, h.1, <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/>

viewcontent.cgi?article=1064&context=uer, diakses 8 Agustus 2014.

- Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Swasono, Sri-Edi, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010.
- Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Haji Massagung, 1988.
- Todaro, Michael P. *Economic Development*, Edisi VI, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1997.
- Todaro, Michael P., *Economic Development in The Third World*, Edisi IV, New York: Longman.